

ANALISIS KORELASI ANTARA PENERAPAN  
PRINSIP-PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*  
DENGAN MANAJEMEN LABA  
PADA EMITEN DI BURSA EFEK JAKARTA

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat  
memperoleh derajat S-2 Magister Sains Akuntansi



Nama : Elisa Trihapsari

NIM : C4C002344

Kepada

PROGRAM STUDI MAGISTER SAINS AKUNTANSI  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
TAHUN 2006

## **PERNYATAAN KEASLIAN TESIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa tesis yang saya ajukan ini adalah hasil karya sendiri, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi atau karya yang pernah ditulis/diterbitkan orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, Januari 2006

Elisa Trihapsari  
NIM C4C002344

Tesis berjudul

ANALISIS KORELASI ANTARA PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP  
*GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DENGAN MANAJEMEN LABA  
PADA EMITEN DI BURSA EFEK JAKARTA

Yang dipersiapkan dan disusun oleh  
**Elisa Trihapsari**  
telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 11 Januari 2006  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Susunan Tim Penguji

Pembimbing Utama/Ketua

Pembimbing/Anggota

Prof. Dr. H. Arifin Sabeni, MCom.Hons, Akt  
NIP. 131 696 214

Drs. H. Abdul Rahman, MSi, Akt  
NIP. 131 991 447

Anggota Tim Penguji

Drs. Darsono, MBA, Akt  
NIP. 131 875 489

Drs. H. Sugeng P, MSi, Akt  
NIP. 130 808 733

Dra. Zulaikha, MSi, Akt  
NIP. 131 945 098

Semarang, 11 Januari 2006  
Universitas Diponegoro  
Program Pascasarjana  
Program Studi Magister Sains Akuntansi  
Ketua Program

Drs. H. Mohamad Nasir, MSi, Akt  
NIP. 131 875 458

## MOTTO

*Segala sesuatu ada masanya karena Allah yang memulai pekerjaan baik di antara kita akan menyelesaikannya dan membuat segala sesuatu indah pada waktunya sehingga segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia.*

*(Pkh 3:1, Flp 1:6, Pkh 3:11, Flp 4:13, Rm 8:28)*

## PERSEMBAHAN

*Tesis ini aku persembahkan untuk :*

*Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria yang telah memberiku kekuatan dan hikmat kepandaian sehingga aku dapat menyelesaikan tesis ini walaupun dalam segala keterbatasan yang ada pada diriku.*

*Mami dan Papa yang telah melahirkan aku ke dunia ini, membesarkan, mendidik serta membimbing aku dengan penuh kasih sayang dan kesabaran sehingga aku menjadi seperti sekarang ini.*

*Saudara-saudaraku terkasih yang tidak pernah bosan membantuku, memberiku semangat dan senantiasa mendukungku dalam segala hal.*

*Kekasih hatiku yang sangat aku sayangi, bagaimanapun keadaannya.*

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria karena atas kasih karunia dan penyertaan-Nya, penulisan tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Magister Sains Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan penulisan tesis ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah dengan sukarela memberikan bimbingan, saran, dorongan dan bantuan yang sangat berguna bagi penulis. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberi bantuan secara tulus sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.

Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada Prof. Dr. H. Arifin Sabeni, MCom.Hons, Akt dan Drs. H. Abdul Rahman, MSi, Akt selaku dosen pembimbing utama dan dosen pembimbing yang telah banyak memberikan petunjuk, pengarahan dan bimbingan sejak perencanaan hingga selesainya tesis ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh staf pengelola, staf pengajar, dan staf administrasi serta karyawan Program Studi Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro Semarang yang telah banyak memberikan bantuan selama penulis mengikuti proses belajar-mengajar. Ucapan terima kasih yang mendalam penulis sampaikan kepada keluarga yang terkasih, terutama kepada Mami (Alm) dan Papa yang telah membimbing penulis di setiap waktu, dari kecil hingga sekarang, dan senantiasa memberikan dorongan dan doa restu kepada penulis. Ucapan terima kasih yang mendalam juga penulis sampaikan kepada Kak Miki yang telah memberikan cinta dan kasih sayang yang tulus kepada

penulis, memberikan semangat dan dorongan serta senantiasa mendoakan penulis di setiap saat. Tak lupa, penulis mengucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan di Maksi Angkatan VIII Sore dan STIE Semarang yang turut memberikan warna pada kehidupan penulis, serta kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tesis ini. Akhir kata, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya dan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan.

Semarang, Januari 2006

Elisa Trihapsari

## ABSTRAKSI

Dalam hubungan keagenan terjadi pemisahan kepemilikan antara pemilik perusahaan (*principal*) dan pengelola perusahaan (*agent*). Dengan pemisahan ini, pemilik perusahaan memberikan kewenangan pada pengelola untuk mengurus jalannya perusahaan. Dengan kewenangan yang dimiliki ini, mungkin saja pengelola tidak bertindak yang terbaik untuk kepentingan pemilik karena adanya perbedaan kepentingan (*conflict of interest*) antara pemilik dan pengelola. Laporan keuangan yang dibuat oleh pengelola perusahaan dengan menggunakan angka-angka akuntansi diharapkan dapat meminimalkan konflik antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. Akan tetapi, karena adanya ketergantungan pihak eksternal pada angka akuntansi, kecenderungan *agent* untuk mencari keuntungan sendiri dan tingkat asimetri informasi yang tinggi, menyebabkan *agent* memanipulasi kinerja yang dilaporkan untuk kepentingan mereka sendiri. *Agent* melakukan manipulasi data dalam menyajikan informasi akuntansi dengan melakukan manajemen laba (*earnings management*) melalui *discretionary accrual*. Tindakan manajemen laba yang dilakukan oleh manajer dapat diminimumkan melalui penerapan *good corporate governance* yang terdiri dari empat prinsip utama, yaitu kewajaran, transparansi, akuntabilitas dan tanggung jawab.

Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan *discretionary accrual* sebagai proksi dari manajemen laba dari perusahaan-perusahaan *go public* non-lembaga keuangan yang pernah mengikuti survei *Corporate Governance Perception Index* tahun 2001 sampai dengan tahun 2004 yang dilakukan oleh *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG). Variabel lain yang dipakai dalam penelitian ini adalah prinsip kewajaran, transparansi, akuntabilitas dan tanggung jawab. Prinsip kewajaran diukur dari opini yang diberikan oleh auditor independen mengenai kewajaran laporan keuangan. Prinsip transparansi diukur dengan kelengkapan laporan keuangan, ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dan kelengkapan laporan non keuangan. Prinsip akuntabilitas diukur dengan adanya komite audit sesuai dengan ketentuan yang berlaku, adanya laporan komite audit dalam laporan tahunan dan rapat yang dilakukan oleh komite audit. Prinsip tanggung jawab diukur dengan adanya kepedulian perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya yang meliputi 4 tema, yaitu kemasyarakatan, ketenagakerjaan, produk dan konsumen, dan lingkungan hidup.

Pengujian dilakukan dengan menggunakan uji korelasi. Pengujian dilakukan untuk tahun 2003, 2004 dan gabungan tahun 2003 dan 2004. Dari pengujian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa secara umum, penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* belum menjamin tidak adanya manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan.

Kata kunci : teori agensi, manajemen laba, *good corporate governance*

## **ABSTRACT**

*Based on agency theory, there is a separating ownership and delegating authority between the owner (principal) and the managers (agents). The principal allows the managers to manage the company to the best of their ability. Unfortunately, managers may not always use their delegated authority in the best interests for the company due to a conflict of interest between owner and managers. A financial statement that is made by a company using accounting numbers is expected to minimize conflict of interests among parties within the company. However, due to the interdependency of external parties with accountancy number, there is a tendency from the agent to look for the self-advantage and therefore mount the high asymmetri information, causing agents to manipulate their performance reports. Agents conduct the data manipulation in presenting accounting information by doing earnings management passing accrual discretionary. Earnings management by managers can be minimized through the application of good corporate governance with consists of the four essential principles of fairness, transparency, accountability and responsibility.*

*This research used the secondary data by discretionary accrual as proxi of earnings management from non-financial companies to public limited companies which ever following a survey of Corporate Governance Perception of year Index 2001 up to year 2004 conducted by The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG). Beside earnings management, the variable used in this research are fairness, transparency, accountability and responsibility. The fairness principle was measured from the opinion given by independent auditor of financial statement. The transparency principal was to be measured with the completeness of financial statement, timeliness of the financial statement reporting and the completeness of non-financial reports. Accountability was measured with the existence of audit committee, annual report of audit committee, and meeting conducted by audit committee. The responsibility principal was measured with the company's social awareness as identified by the four major factors, that is society, employment, products and consumers, and environment.*

*The hypothesis was examined by correlational test. The test was done for the year of 2003, 2004 and combination of 2003 and 2004. In generally, the test's results show that the application of good corporate governance's principles not ensure that earnings management not be done yet.*

*Keyword : agency theory, earnings management, good corporate governance*



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
<i>ABSTRACT</i> .....	v
ABSTRAKSI .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
Latar Belakang Masalah .....	1
Perumusan Masalah .....	9
Tujuan Penelitian .....	10
Manfaat Penelitian .....	11
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS .....	12
2.1. Telaah Pustaka .....	12
2.1.1. Teori Agensi ( <i>Agency Theory</i> ) .....	12
2.1.2. Manajemen Laba .....	15
2.1.3. <i>Good Corporate Governance</i> .....	20
2.2. Kerangka Pemikiran Teoritis dan Perumusan Hipotesis .....	31
2.2.1. Kewajaran dan Manajemen Laba .....	31

2.2.2. Transparansi dan Manajemen Laba .....	32
2.2.3. Akuntabilitas dan Manajemen Laba .....	34
2.2.4. Responsibilitas dan Manajemen Laba .....	36
BAB III METODE PENELITIAN .....	38
3.1. Jenis dan Sumber Data .....	38
3.2. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel .....	38
3.3. Definisi Operasional Variabel .....	39
3.4. Teknik Analisis .....	45
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN .....	47
4.1. Deskripsi Objek Penelitian .....	47
4.2. Nilai <i>Discretionary Accrual</i> sebagai Proksi Manajemen Laba .....	51
4.3. Hasil Analisis Korelasi .....	52
4.4. Hasil Pengujian Hipotesis .....	55
4.5. Analisis Hasil Penelitian .....	57
4.5.1. Analisis Hasil Pengujian Hipotesis Pertama .....	58
4.5.2. Analisis Hasil Pengujian Hipotesis Kedua .....	59
4.5.3. Analisis Hasil Pengujian Hipotesis Ketiga .....	59
4.5.4. Analisis Hasil Pengujian Hipotesis Keempat .....	60
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....	61
5.1. Kesimpulan .....	61
5.2. Implikasi Penelitian .....	62
5.3. Keterbatasan dan Saran .....	62
DAFTAR PUSTAKA .....	63

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Perusahaan-perusahaan yang Diteliti .....	50
Tabel 2 Hasil Korelasi antara Prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> dengan Manajemen Laba Tahun 2003 .....	52

Tabel 3	Hasil Korelasi antara Prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> dengan Manajemen Laba Tahun 2004 .....	53
Tabel 4	Hasil Korelasi antara Prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> dengan Manajemen Laba Tahun 2003 dan 2004 .....	55

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Kerangka Pemikiran Teoritis .....	37

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Data Induk Tahun 2003

Lampiran 2 Hasil Regresi Total AkruaI Tahun 2003

Lampiran 3 Nilai *Non-Discretionary Accrual* dan *Discretionary Accrual*  
Tahun 2003

Lampiran 4 Hasil Korelasi antara Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*  
dengan Manajemen Laba Tahun 2003

- Lampiran 5 Data Induk Tahun 2004
- Lampiran 6 Hasil Regresi Total AkruaI Tahun 2004
- Lampiran 7 Nilai *Non-Discretionary Accrual* dan *Discretionary Accrual* Tahun 2004
- Lampiran 8 Hasil Korelasi antara Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dengan Manajemen Laba Tahun 2004
- Lampiran 9 Hasil Regresi Total AkruaI Tahun 2003 dan 2004
- Lampiran 10 Nilai *Non-Discretionary Accrual* dan *Discretionary Accrual* Tahun 2003 dan 2004
- Lampiran 11 Hasil Korelasi antara Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dengan Manajemen Laba Tahun 2003 dan 2004

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **Latar Belakang Masalah**

Dalam hubungan keagenan terjadi pemisahan kepemilikan antara pemilik perusahaan (*principal*) dan pengelola perusahaan (*agent*). Dengan pemisahan ini, pemilik perusahaan memberikan kewenangan pada pengelola untuk mengurus jalannya perusahaan, seperti mengelola dana dan mengambil keputusan perusahaan lainnya untuk dan atas nama pemilik. Dengan kewenangan yang dimiliki ini, mungkin saja pengelola tidak bertindak yang terbaik untuk kepentingan pemilik karena adanya perbedaan kepentingan (*conflict of interest*) antara pemilik dan pengelola. Diasumsikan bahwa pemilik dan pengelola cenderung berusaha untuk memaksimalkan kesejahteraan masing-masing sehingga ada kemungkinan jika pengelola tidak selalu bertindak demi kepentingan terbaik dari pemilik (Jensen dan Meckling, 1976). Pengelola cenderung bertindak untuk memaksimalkan kepentingannya sendiri dengan mengorbankan kepentingan pihak lain (Jensen dan Murphy, 1990 dalam Pratana Puspa Madiastuty dan Mas'ud Machfoedz, 2003).

Adanya pemisahan kepemilikan antara pengelola dan pemilik mengakibatkan pemilik membebankan tanggung jawab kepada pengelola untuk melaporkan kinerja perusahaan dalam bentuk laporan keuangan, dimana laporan keuangan menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya (Kerangka Dasar Penyajian dan Penyusunan Laporan Keuangan, 1994). Salah satu informasi yang terdapat dalam laporan keuangan yang dapat menyebabkan terjadinya perbedaan kepentingan adalah informasi mengenai laba, karena informasi mengenai laba sering digunakan sebagai dasar untuk pembuatan keputusan oleh berbagai pihak

yang berkepentingan, misalnya digunakan sebagai dasar untuk memberikan bonus kepada manajer, menghitung penghasilan kena pajak dan terutama sebagai kriteria penilaian kinerja manajemen perusahaan (Siti Munfiah Hidayati dan Zulaikha, 2003).

Namun demikian, seringkali para pengguna informasi laba yang menggunakan laba sebagai kriteria dalam penilaian kinerja manajemen tidak mempertimbangkan prosedur yang digunakan dalam menghasilkan informasi tersebut, sehingga mendorong manajer untuk melakukan manajemen laba (Beattie *et al.*, 1994). Manajemen laba (*earnings management*) merupakan manipulasi terhadap laba yang dilakukan pihak manajemen untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Manipulasi dilakukan agar laba tampak sebagaimana yang diharapkan (Fern *et al.*, 1994 dalam Sekar Mayangsari, 2001). Ada kecenderungan *agent* melakukan pengelolaan terhadap laba (*earnings management*), yaitu intervensi manajemen (*agent*) dalam proses penyusunan pelaporan keuangan sehingga dapat menaikkan atau menurunkan laba akuntansi sebagai usaha dari *agent* untuk memaksimalkan kepentingannya (Scott, 1997).

Healy dan Wahlen (1999) berpendapat bahwa manajemen laba terjadi ketika manajemen menggunakan keputusan tertentu dalam laporan keuangan dan transaksi untuk mengubah laporan keuangan sebagai dasar kinerja perusahaan yang bertujuan menyesatkan pemilik atau pemegang saham atau untuk mempengaruhi hasil kontraktual yang mengandalkan angka-angka akuntansi yang dilaporkan. Manajemen laba terjadi karena manajer diberikan beberapa keleluasaan untuk menerapkan standar akuntansi keuangan yang memungkinkan *agent* untuk memilih metode yang akan digunakan dalam mengungkapkan informasi keuangan dari perusahaan yang dikelolanya, dan seringkali perhatian *principal* hanya terpusat pada informasi laba yang disajikan *agent* tanpa memperhatikan prosedur yang digunakan untuk menghasilkan informasi laba tersebut.



Tindakan manajemen laba juga dapat terjadi karena adanya asimetri informasi (*information asymmetry*) yang tinggi antara manajemen dengan pihak lain yang tidak mempunyai sumber, dorongan atau akses yang memadai terhadap informasi untuk memonitor tindakan *agent* (Richardson, 1998). Asimetri informasi timbul ketika *agent* memiliki informasi internal perusahaan yang relatif lebih banyak dan mengetahui informasi relatif lebih cepat dibandingkan *principal*, sehingga *agent* akan berusaha memanipulasi kinerja perusahaan yang dilaporkan untuk kepentingannya sendiri (Morris, 1987).

Praktik manajemen laba oleh manajer yang berawal dari konflik kepentingan dan adanya asimetri informasi ini dapat diminimumkan melalui suatu mekanisme monitoring yang bertujuan untuk menyelaraskan (*alignment*) berbagai kepentingan tersebut (Pratana Puspa Midiastry dan Mas'ud Machfoedz, 2003). Menurut teori keagenan, untuk mengatasi masalah ketidakselarasan kepentingan antara *principal* dan *agent* dapat dilakukan melalui pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

*Corporate governance* merupakan hal yang sangat penting dalam mencapai keberhasilan kegiatan bisnis (Chairuman Armia, 2002) karena *corporate governance* merupakan sebuah sistem untuk mengontrol dan mengarahkan perusahaan (David Melvill dalam Listyorini, 2001). Menurut Shleifer dan Vishny (1997), *corporate governance* merupakan suatu mekanisme yang digunakan oleh suplier keuangan untuk melakukan kontrol terhadap manajer guna memastikan bahwa suplier keuangan perusahaan memperoleh pengembalian (*return*) dari kegiatan yang dijalankan oleh manajer.

Di Indonesia, isu *corporate governance* muncul setelah terjadinya krisis ekonomi tahun 1997 sebagai reaksi atas perilaku para pengelola perusahaan yang tidak memperhitungkan *stakeholder*-nya (Harmanto Edy Jatmiko, 2001). Krisis

ekonomi memberi pelajaran berharga bahwa pembangunan yang dipacu selama ini ternyata tidak didukung dengan struktur ekonomi yang kokoh. Hampir semua pengusaha besar menjalankan roda bisnis dengan manajemen yang acak-acakan dan sarat dengan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sejak adanya gerakan reformasi tahun 1998, muncul banyak tekanan dari publik yang menghendaki agar pemerintah maupun swasta dapat menghapuskan praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, yang secara politis lebih dikenal dengan istilah KKN, dan selanjutnya diharapkan mampu mengelola usaha secara terbuka, adil, dapat dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab (Parwoto Wignjohartojo, 2001). Untuk mewujudkan harapan tersebut, diperlukan perubahan sikap secara bersama-sama dan berperilaku sesuai dengan harapan itu, agar dapat bangkit kembali dari kemelut krisis, siap bersaing menghadapi era globalisasi dan dapat meningkatkan kesejahteraan bersama. Dalam dunia bisnis, hal tersebut dapat direalisasikan melalui implementasi *good corporate governance* yang menjadi landasan pengelolaan usaha yang sehat, agar harapan para *stakeholders* dapat dipenuhi secara keseluruhan.

Dalam rangka penerapan *good corporate governance* di Indonesia, pemerintah telah membentuk suatu lembaga (komite), yaitu Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance*, yang bertugas merumuskan dan menyusun rekomendasi kebijakan nasional mengenai *corporate governance* yang mencakup:

- a. Pedoman *good corporate governance* untuk dijadikan acuan dunia usaha, termasuk program sosialisasinya
- b. Rincian penyempurnaan perangkat hukum dan perundangan untuk mendukung penerapan pedoman *good corporate governance*
- c. Struktur kelembagaan, baik yang permanen maupun ad hoc dan sementara untuk mendukung penerapan pedoman *good corporate governance*

Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* telah menetapkan pedoman *good corporate governance* yang berisi rekomendasi penting yang berfungsi sebagai kerangka badan-badan regulator dan asosiasi-asosiasi industri. Melalui pedoman ini, masyarakat dimungkinkan untuk melakukan pengawasan secara langsung terhadap entitas bisnis. Pedoman *good corporate governance* memuat 13 (tiga belas) aspek, yaitu pemegang saham, dewan komisaris, direksi, sistem audit, sekretaris perusahaan, pihak-pihak yang berkepentingan, keterbukaan, kerahasiaan, informasi orang dalam, etika berusaha dan anti korupsi, donasi, kepatuhan pada peraturan perundang-undangan tentang proteksi kesehatan, keselamatan kerja dan pelestarian lingkungan, dan kesempatan kerja yang sama

Pada dasarnya, ketiga belas aspek tersebut merupakan pengembangan dari empat prinsip utama dalam *good corporate governance* sebagaimana yang dirumuskan oleh *Forum for Corporate Governance in Indonesia*, yaitu :

a. Kewajaran

Prinsip ini menekankan adanya perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, terutama kepada pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing, dengan keterbukaan informasi yang penting serta melarang pembagian untuk pihak sendiri dan perdagangan saham oleh orang dalam.

b. Transparansi

Prinsip ini mewajibkan adanya keterbukaan informasi yang disampaikan tepat pada waktunya, jelas, dan dapat diperbandingkan, terutama menyangkut masalah keuangan, pengelolaan perusahaan, dan kepemilikan perusahaan.

c. Akuntabilitas

Prinsip ini menitikberatkan pada adanya dewan komisaris dan dewan direksi yang kompeten di bidangnya serta penjelasan mengenai peran dan tanggung

jawab serta mendukung usaha yang bertujuan untuk keseimbangan kepentingan manajemen dan pemegang saham.

d. **Responsibilitas**

Prinsip ini menitikberatkan pada tanggung jawab perusahaan sebagai anggota masyarakat yang tunduk kepada hukum dan bertindak dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat di sekitarnya.

Prinsip-prinsip tersebut merupakan prinsip-prinsip utama dalam *good corporate governance* yang terkait langsung dengan permasalahan yang dihadapi dunia usaha pada umumnya, yakni masalah korupsi dan ketidakjujuran, tanggung jawab sosial dan etika korporasi, tata kelola sektor publik dan reformasi hukum (I Nyoman Tjager *et al.*, 2003). Penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance*, dalam suatu perusahaan dapat mengurangi terjadinya tindakan manajemen laba yang dilakukan oleh pengelola perusahaan karena dengan penerapan prinsip-prinsip ini, pengelola dituntut untuk menjalankan perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip *good corporate governance*.

Beberapa penelitian mengenai pengaruh *good corporate governance* terhadap manajemen laba telah dilakukan, antara lain penelitian mengenai pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap manajemen laba. Warfield *et al.* (1995) melakukan penelitian di pasar modal Amerika dan menemukan adanya hubungan yang negatif antara kepemilikan manajerial dan manajemen laba yang diukur dengan *discretionary accrual*. Penelitian tersebut juga menemukan adanya hubungan yang positif antara kepemilikan manajerial dengan kandungan informasi dalam laba. Penelitian yang sama dilakukan oleh Gabrielsen *et al.* (1999 dalam Pratana Puspa Midiastuty dan Mas'ud Machfoedz, 2003) dengan sampel penelitian di pasar modal Denmark. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan positif tetapi tidak

signifikan antara kepemilikan manajerial dan *discretionary accrual* serta ada hubungan yang negatif antara kepemilikan manajerial dan kandungan informasi dari laba.

Penelitian mengenai pengaruh kepemilikan institusional terhadap manajemen laba dilakukan oleh Rajgopal *et al.* (1999) yang menemukan adanya hubungan negatif antara kepemilikan oleh investor institusional dengan perilaku manajemen laba yang diukur dengan nilai absolut dari *discretionary accruals*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Shleifer dan Vishny (1997) di beberapa negara di dunia menemukan bahwa struktur kepemilikan perusahaan-perusahaan yang berada di negara-negara selain Amerika dan Inggris berbeda dengan struktur kepemilikan perusahaan-perusahaan yang berada di Amerika. Perusahaan-perusahaan yang berada di negara-negara selain Amerika dan Inggris biasanya memiliki struktur kepemilikan saham yang terkonsentrasi (*large investor*) yang biasanya dimiliki oleh investor institusional. La Porta *et al.* (1999) juga menemukan bahwa pada perusahaan-perusahaan yang berada pada beberapa negara yang sedang berkembang memiliki tingkat konsentrasi kepemilikan yang lebih tinggi.

Beberapa peneliti juga telah meneliti hubungan antara dewan direksi dan praktik manajemen laba. Beasley (1996) yang menguji hubungan antara dewan direksi perusahaan dan kemungkinan adanya kecurangan dalam laporan keuangan membuktikan bahwa ada hubungan yang negatif antara persentase anggota non-eksekutif dalam dewan direksi dan kemungkinan adanya kecurangan. Beasley juga menemukan ada hubungan yang positif antara ukuran dewan direksi dan kemungkinan adanya kecurangan dalam laporan keuangan, yaitu ukuran dewan direksi yang besar tidak efektif dalam mengontrol proses pelaporan keuangan. Hasil penelitian dari Beasley ini didukung oleh Yermarck (1996) yang menyatakan bahwa kemampuan dewan direksi untuk memonitor akan berkurang dengan semakin

besarnya ukuran dewan direksi karena akan menimbulkan masalah dalam koordinasi, komunikasi, dan pembuatan keputusan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Beasley dan Yermak bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Chtourou *et al.* (2001) yang membuktikan bahwa ukuran dewan direksi berhubungan negatif dengan tindakan manajemen laba dan menyimpulkan bahwa ukuran dewan direksi yang besar lebih efektif dalam memonitor proses pelaporan keuangan.

Di Indonesia sendiri, penelitian mengenai hubungan mekanisme *corporate governance* dan indikasi manajemen laba telah dilakukan oleh Pratana Puspa Midiastuty dan Mas'ud Machfoedz (2003). Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme *corporate governance* yang meliputi kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional merupakan mekanisme yang mampu mengontrol dan meminimalkan perilaku manipulasi laba oleh manajer, sedangkan mekanisme *corporate governance* yang berupa ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap manajemen laba.

Deni Darmawati (2003) juga melakukan penelitian mengenai pengaruh *corporate governance* terhadap manajemen laba. Mekanisme *corporate governance* yang diuji dalam penelitian ini adalah komitmen perusahaan terhadap *corporate governance*, pelaksanaan RUPS dan perlakuan terhadap pemegang saham minoritas, kualitas dewan komisaris, kualitas dewan direksi, kualitas hubungan perusahaan dengan *stakeholders*, transparansi dan akuntabilitas, dan kepemilikan saham oleh investor institusional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya satu dari mekanisme *corporate governance* yang berhubungan negatif dengan manajemen laba, yaitu kualitas hubungan perusahaan dengan *stakeholders*.

Selama ini penelitian yang menguji hubungan antara penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* dengan manajemen laba belum pernah dilakukan. Oleh karena itu penelitian ini akan menguji hubungan antara penerapan prinsip

kewajaran, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dengan manajemen laba. Pengujian akan dilakukan pada perusahaan *go public* non-lembaga keuangan yang pernah mengikuti *Corporate Governance Perception Index* tahun 2001 sampai dengan tahun 2004.

### **Perumusan Masalah**

Laporan keuangan yang dibuat dengan menggunakan angka-angka akuntansi diharapkan dapat meminimalkan konflik antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976; Watts dan Zimmerman, 1986). Akan tetapi, adanya ketergantungan pihak eksternal pada angka akuntansi, kecenderungan *agent* untuk mencari keuntungan sendiri dan tingkat asimetri informasi yang tinggi, menyebabkan *agent* memanipulasi kinerja yang dilaporkan untuk kepentingan mereka sendiri. *Agent* melakukan manipulasi data dalam menyajikan informasi akuntansi dengan melakukan manajemen laba (*earnings management*) melalui *discretionary accruals* agar sesuai dengan harapan *principal* meskipun informasi tersebut tidak menggambarkan kondisi riil perusahaan.

Tindakan manajemen laba yang dilakukan oleh manajer dapat diminimumkan melalui penerapan *good corporate governance* yang terdiri dari empat prinsip utama, yaitu kewajaran, transparansi, akuntabilitas dan responsibilitas. Dari rumusan di atas, maka permasalahan pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah penerapan prinsip kewajaran berhubungan negatif dengan manajemen laba?
2. Apakah penerapan prinsip transparansi berhubungan negatif dengan manajemen laba?
3. Apakah penerapan prinsip akuntabilitas berhubungan negatif dengan manajemen laba?

4. Apakah penerapan prinsip tanggung jawab berhubungan negatif dengan manajemen laba?

### **Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Menguji secara empiris hubungan antara penerapan prinsip kewajaran dengan manajemen laba.
2. Menguji secara empiris hubungan antara penerapan prinsip transparansi dengan manajemen laba.
3. Menguji secara empiris hubungan antara penerapan prinsip akuntabilitas dengan manajemen laba.
4. Menguji secara empiris hubungan antara penerapan prinsip tanggung jawab dengan manajemen laba.

### **Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi para pengguna informasi yang menjadikan laba sebagai tolok ukur kinerja perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu para pengguna dalam mengevaluasi apakah laba yang dihasilkan merupakan hasil tindakan manajemen laba atau bukan.
2. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam mengurangi adanya masalah keagenan.
3. Bagi ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pustaka mengenai perkembangan akuntansi di Indonesia.



## BAB II

### TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

#### Telaah Pustaka

##### Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi muncul setelah fenomena terpisahnya kepemilikan perusahaan dengan pengelolaan terdapat dimana-mana, khususnya pada perusahaan-perusahaan besar yang modern, sehingga teori perusahaan yang klasik tidak bisa lagi dijadikan basis analisis perusahaan (Kresnohadi Ariyoto *et al.*, 2000). Pada teori perusahaan klasik, pemilik perusahaan yang berjiwa wiraswasta mengendalikan sendiri perusahaannya, mengambil keputusan demi kehidupan perusahaannya, sehingga yang diharapkan adalah maksimum profit sebagai syarat mutlak untuk bisa hidup dan berkembang. Dalam teori perusahaan klasik, kebutuhan modal dan ketrampilan manajerial perusahaan dipasok oleh satu sumber saja, yaitu pemilik yang wiraswasta. Sedangkan dalam teori agensi, pengelolaan perusahaan diserahkan kepada *agent* oleh pemegang saham dan pemberi pinjaman (*principal*). Menurut Kresnohadi Ariyoto (2000), pengertian *principal* dalam teori agensi adalah pihak-pihak yang menyerahkan sebagian atau seluruh kekayaannya untuk dikembangkan oleh pihak lain. Adanya penyerahan pengelolaan perusahaan dari *principal* kepada *agent* mengakibatkan timbulnya hubungan keagenan antara *principal* dan *agent*.

Dalam hubungannya dengan masalah keagenan ini, *positive accounting theory* (Watts dan Zimmerman, 1990) mengajukan tiga hipotesis, yaitu *bonus plan hypothesis*, *debt/equity hypothesis* dan *political cost hypothesis*, yang secara implisit mengakui tiga bentuk hubungan keagenan (*agency relationship*), yaitu antara pemilik dengan manajemen, antara kreditur dengan manajemen dan antara pemerintah

dengan manajemen. Sedangkan Jensen dan Meckling (1976) dan Scott (1997) menggambarkan hubungan keagenan sebagai hubungan yang timbul karena adanya kontrak yang ditetapkan oleh *principal* yang menggunakan *agent* untuk melakukan jasa yang menjadi kepentingan *principal* dalam hal terjadi pemisahan kepemilikan dan kontrol perusahaan. Agar hubungan kontraktual ini dapat berjalan dengan lancar, *principal* akan mendelegasikan otoritas pembuatan keputusan kepada *agent*.

Secara garis besar, Jensen dan Meckling menggambarkan dua macam bentuk keagenan, yaitu antara manajer dan pemegang saham (*shareholders*) dan antara manajer dengan pemberi pinjaman (*bondholders*). Jensen dan Meckling memberikan definisi untuk menggambarkan hubungan keagenan sebagai berikut :

*“A contract under which one or more persons (the principal(s)) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decisions making authority to the agent. If both parties to the relationship are utility maximizers there is good reason to believe that the agent will not always act in the best interests of the principal”*

*Principal* mendelegasikan tanggung jawab pembuatan keputusan kepada *agent*, sedangkan *agent* setuju untuk bertindak atas perintah/wewenang pihak lain (*principal*). Baik *principal* maupun *agent* diasumsikan sebagai pemaksimal nilai guna dan berasio ekonomi yang dimotivasi oleh kepentingan pribadinya, namun mereka berbeda dalam hal pilihan, kepentingan dan informasi.

Masalah keagenan (*agency problem*) muncul ketika *principal* kesulitan untuk memastikan bahwa *agent* bertindak untuk memaksimalkan kesejahteraan *principal*. Hubungan keagenan antara *principal* dan *agent* memberikan suatu pemahaman akan perilaku organisasional dengan memaksimalkan keinginan mereka (Wolk dan Tearney, 1997). Usaha memaksimalkan keinginan mendorong terjadinya konflik kepentingan antara *principal* dan *agent* karena setiap pihak berusaha memaksimalkan kepentingannya. *Principal* menginginkan profitabilitas yang selalu meningkat,

sedangkan *agent* berusaha memaksimalkan pemenuhan kebutuhannya melalui kompensasi yang diterimanya.

Selain konflik kepentingan, antara *principal* dan *agent* juga terjadi asimetri informasi (*information asymmetries*). Menurut Scott (1997), asimetri informasi merupakan suatu kondisi dimana beberapa pihak yang terkait dalam transaksi bisnis lebih memiliki informasi dibandingkan pihak lainnya. Asimetri informasi dapat berupa informasi yang terdistribusi dengan tidak merata antara *principal* dan *agent*. *Principal* dan *agent* ingin memaksimalkan *utility* masing-masing dengan informasi yang dimiliki, namun informasi yang dimiliki *agent* lebih banyak dibandingkan informasi yang dimiliki oleh *principal*. Informasi yang lebih banyak dimiliki oleh *agent* dapat memicu *agent* untuk melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan keinginan dan kepentingan *agent* untuk memaksimalkan kepentingannya.

Adanya konflik kepentingan dan asimetri informasi antara *principal* dan *agent* akan mendorong *agent* sebagai pemegang mandat dari *principal* untuk melakukan perilaku yang tidak semestinya (*disfunctional behaviour*). Untuk mengawasi perilaku *agent* serta untuk menyelaraskan tujuan *principal* dan *agent*, *principal* mewajibkan *agent* untuk mempertanggungjawabkan sumber daya yang dipercayakan kepadanya melalui mekanisme pelaporan keuangan secara periodik. Melalui laporan keuangan yang merupakan tanggung jawab *agent*, *principal* dapat mengukur, menilai sekaligus mengawasi kinerja *agent*, sejauh mana *agent* telah bertindak untuk meningkatkan kesejahteraan *principal*. Disamping itu, dengan adanya laporan keuangan, pemilik/pemegang saham dapat memberikan kompensasi kepada *agent* berdasarkan laporan keuangan, kreditur dapat memberikan pinjaman dengan mempertimbangkan laporan keuangan, pemerintah dapat menetapkan regulasi berdasarkan laporan tersebut (Linda Kusumaning Wedari, 2004).

## **Manajemen Laba**

Laporan keuangan yang dibuat dengan menggunakan angka-angka akuntansi diharapkan dapat meminimalkan konflik antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976; Watts dan Zimmerman, 1986). Laba merupakan informasi utama yang disajikan dalam laporan keuangan, sehingga angka-angka yang ada di dalamnya merupakan *crucial point* yang harus dicermati oleh para pemakai laporan keuangan.

Perhatian para investor dan pemilik (*principal*) sering terpusat pada informasi laba tanpa memperhatikan prosedur yang digunakan untuk menghasilkan informasi laba tersebut (Beattie *et al.*, 1994). Angka-angka dalam laporan keuangan merupakan fungsi dari metode-metode akuntansi yang dipilih oleh manajemen (*agent*) suatu perusahaan. Kebebasan manajemen dalam memilih metode dan *judgment* akuntansi memberi peluang bagi manajemen untuk melakukan manajemen laba dan menyajikan laba sesuai dengan yang diinginkannya.

Manajemen laba merupakan campur tangan manajemen dalam proses pelaporan keuangan eksternal dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri (Lilis Setiawati dan Ainun Na'im, 2000). Manipulasi dilakukan agar *earnings* tampak sebagaimana yang diharapkan (Fern *et al.*, 1994 dalam Sekar Mayangsari, 2001) dan investor tetap tertarik dengan perusahaan tersebut (DeGeorge, Patel dan Zeckhauser, 1999 dalam Sekar Mayangsari, 2001).

Healy dan Wahlen (1999) berpendapat bahwa manajemen laba terjadi ketika manajer menggunakan pertimbangan (*judgment*) dalam pelaporan keuangan, dan menyusun transaksi untuk mengubah laporan keuangan dengan tujuan untuk menyesatkan *stakeholders* mengenai kinerja ekonomi perusahaan, atau untuk mempengaruhi *contractual outcomes* yang tergantung pada angka-angka akuntansi yang dilaporkan. Berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh Healy dan

Wahlen yang meninjau manajemen laba dalam kaitannya dengan badan penetap standar, Schipper (1989) meninjau manajemen laba dari fungsi pelaporan kepada pihak eksternal. Schipper mengartikan manajemen laba sebagai “*disclosure management*” dalam pengertian bahwa manajemen melakukan intervensi terhadap proses pelaporan keuangan kepada pihak eksternal dengan maksud untuk memperoleh keuntungan pribadi. Definisi yang diberikan oleh Schipper tersebut tidak mendasarkan pada konsep khusus mengenai laba (*earnings*), namun didasarkan pada pandangan bahwa angka akuntansi sebagai suatu informasi. Berdasarkan definisi ini, manajemen laba dapat terjadi dalam berbagai proses pengungkapan informasi akuntansi kepada pihak eksternal.

Kellog dan Kellog (1991 dalam Sekar Mayangsari, 2001) melihat ada dua motivasi utama untuk melakukan manajemen laba, yaitu mendorong investor untuk membeli saham perusahaan tersebut dan untuk meningkatkan nilai pasar perusahaan. Sedangkan menurut Dye (1988) manajemen laba dilakukan dengan motivasi untuk meningkatkan bonus dan meningkatkan nilai pasar perusahaan. Praktik manajemen laba berasal dari manajer yang mengambil manfaat karena adanya asimetri informasi.

Sedangkan menurut Scott (1997), motivasi manajer untuk melakukan manajemen laba adalah :

a. Rencana bonus (*bonus scheme*)

Manajer yang bekerja di perusahaan dengan rencana bonus akan berusaha mengatur laba yang dilaporkan agar dapat memaksimalkan bonus yang akan diterimanya.

b. Kontrak hutang jangka panjang (*debt covenant*)

Motivasi ini sejalan dengan hipotesis *debt covenant* dalam teori akuntansi positif, yaitu semakin dekat suatu perusahaan ke pelanggaran perjanjian hutang, maka manajer akan cenderung memilih metode akuntansi yang dapat “memindahkan” laba periode mendatang ke periode berjalan sehingga dapat mengurangi kemungkinan perusahaan mengalami pelanggaran kontrak.

c. Motivasi politik (*political motivation*)

Perusahaan-perusahaan besar dan industri strategis cenderung menurunkan laba untuk mengurangi visibilitasnya, khususnya selama periode kemakmuran tinggi. Tindakan ini dilakukan untuk memperoleh kemudahan dan fasilitas dari pemerintah, misalnya subsidi.

d. Motivasi perpajakan (*taxation motivation*)

Perpajakan merupakan salah satu alasan utama mengapa perusahaan mengurangi laba yang dilaporkan. Dengan mengurangi laba yang dilaporkan, maka perusahaan dapat meminimalkan besar pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah.

e. Pergantian CEO

CEO yang akan habis masa penugasannya akan melakukan strategi memaksimalkan laba untuk meningkatkan bonusnya. Demikian pula dengan CEO yang kinerjanya kurang baik, akan cenderung memaksimalkan laba untuk mencegah atau membatalkan pemecatannya.

f. Penawaran saham perdana (*initial public offering*)

Saat perusahaan *go public*, informasi keuangan yang ada dalam prospektus merupakan sumber informasi yang penting. Informasi ini dapat dipakai sebagai sinyal kepada calon investor tentang nilai perusahaan. Untuk mempengaruhi keputusan calon investor, manajer akan berusaha untuk menaikkan laba yang dilaporkan.

Scott (1997) mengidentifikasi adanya empat pola yang dilakukan oleh manajemen untuk melakukan manajemen laba, yaitu *taking a bath*, *income minimization*, *income maximization* dan *income smoothing*. *Taking a bath* dilakukan ketika terjadi keadaan buruk yang tidak menguntungkan dan tidak bisa dihindari pada periode berjalan, yaitu dengan cara mengakui biaya-biaya pada periode-periode yang akan datang dan kerugian periode berjalan. *Income minimization* dilakukan saat perusahaan memperoleh profitabilitas yang tinggi dengan tujuan agar tidak mendapat perhatian secara politis. Kebijakan yang diambil bisa berupa pembebanan pengeluaran iklan, riset dan pengembangan yang cepat. *Income maximization* dilakukan dengan memaksimalkan laba agar memperoleh bonus yang lebih besar. Demikian pula dengan perusahaan yang mendekati kontrak hutang jangka panjang, manajer perusahaan tersebut akan cenderung untuk memaksimalkan laba. Sedangkan *income smoothing* dilakukan dengan menaikkan atau menurunkan laba untuk mengurangi fluktuasi laba yang dilaporkan sehingga perusahaan terlihat stabil dan tidak berisiko tinggi.

Manajer dapat melakukan manajemen laba dengan memanfaatkan pos-pos akrual yang ada dalam laporan keuangan guna menyajikan laba yang sesuai dengan kepentingannya yang mungkin tidak sesuai dengan kepentingan *principal* seperti pemilik, pemegang saham atau pemberi pinjaman. Hal ini dapat terjadi karena dalam akuntansi digunakan dasar akrual (*accrual basis*), yang mewajibkan perusahaan untuk mengakui pendapatan dan biaya yang sudah menjadi hak dan kewajiban dalam periode sekarang meskipun transaksi kas-nya baru terjadi dalam periode berikutnya. Hal ini mengakibatkan laporan keuangan yang merupakan hasil dari proses akuntansi mengandung komponen akrual (Slamet Sugiri, 1998), baik yang berada di bawah kebijakan manajemen (*discretionary*) maupun yang tidak (*non discretionary*).

Beneish (2001, dalam Sylvia Veronica dan Yanivi S. Bachtiar, 2003) menyatakan bahwa berkembangnya *earnings management* yang dilakukan melalui basis akrual didasarkan oleh tiga hal. Pertama, akrual merupakan produk utama dari prinsip akuntansi yang diterima umum (*generally accepted accounting principle*), dan *earnings management* lebih mudah terjadi pada laporan yang berbasis akrual dibandingkan dengan laporan yang berbasis kas. Kedua, dengan mempelajari akrual akan mengurangi masalah yang timbul dalam mengukur dampak dari berbagai pilihan metode akuntansi terhadap laba. Ketiga, jika indikasi *earnings management* tidak dapat diamati dari akrual, maka investor tidak akan dapat menjelaskan dampak dari *earnings management* pada penghasilan yang dilaporkan perusahaan.

Konsep akrual digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar akuntansi *matching of cost with revenue* (Siti Munfiah Hidayati dan Zulaikha, 2003). Menurut konsep ini, pengakuan beban atau pendapatan harus diakui sesuai dengan hak yang diukur dalam satu periode akuntansi tanpa mempertimbangkan adanya penerimaan kas tunai, karena konsep dasar kas tidak dapat memenuhi kriteria kesepadanan antara penghasilan dan beban. Oleh karena itu, untuk pengakuan pendapatan dan beban menurut standar akuntansi yang diterima umum adalah konsep akrual. Penerapan konsep akrual inilah yang memungkinkan adanya kesempatan bagi manajer untuk melakukan manajemen laba dengan menaikkan atau menurunkan porsi angka akrual dalam laporan laba rugi.

### ***Good Corporate Governance***

Konflik kepentingan yang terjadi antara *principal* dan *agent* dapat diatasi melalui pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*). *Corporate governance* merupakan suatu mekanisme yang digunakan untuk memastikan bahwa suplier keuangan, misalnya pemegang saham (*shareholders*) dan pemberi pinjaman



(*bondholders*), dari perusahaan memperoleh pengembalian (*return*) dari kegiatan yang dijalankan oleh manajer, atau dengan kata lain, bagaimana suplier keuangan perusahaan melakukan kontrol terhadap manajer (Shleifer dan Vishny, 1997).

*Corporate governance* merupakan suatu sistem dan struktur yang baik untuk mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang saham serta mengakomodasi berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (*stakeholders*), seperti kreditur, pemasok, asosiasi bisnis, konsumen, pekerja, pemerintah dan masyarakat luas (Harmanto Edy Djatmiko, 2001). Sedangkan *Cadbury Committee* memandang *corporate governance* sebagai seperangkat aturan yang merumuskan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditur, pemerintah, karyawan, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya baik internal maupun eksternal sehubungan dengan hak-hak dan tanggung jawab mereka.

Tumbull (1997, dalam Akhmad Syakhroza, 2003) lebih menekankan *corporate governance* pada bagaimana melakukan tata kelola dalam sebuah organisasi dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kepada proses organisasi dalam rangka menghasilkan dan menjual barang atau jasa. Tumbull mendefinisikan *corporate governance* sebagai :

*“corporate governance describes all the influences affecting the institutional processes including those for appointing the controllers and/or regulators, involved in organizing the production and sale of goods and services”*

*Organization for Economic Cooperation and Development* (dalam I Nyoman Tjager *et al.*, 2003) mendefinisikan *corporate governance* sebagai

*“The structure through which shareholders, directors, managers set of the board objective of the company, the means of attaining those objectives and monitoring performance”*

*Forum for Corporate Governance in Indonesia* (dalam I Nyoman Tjager *et al.*, 2003) mendefinisikan *corporate governance* dalam arti luas, yaitu sebagai :

“ . . . seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. *Corporate governance* bertujuan menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*)”

Pengertian yang lebih sempit mengenai *corporate governance* dikemukakan oleh Donaldson dan Davis (dalam I Nyoman Tjager *et al.*, 2003) yang mendefinisikan *corporate governance* sebagai :

*“the structure whereby managers at the organizational apex are controlled through the board directors, its associated structures, executive incentive, and other schemes of monitoring and bonding”*

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *corporate governance* merupakan seperangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan serta memacu terbentuknya pola manajemen yang profesional, transparan, bersih dan berkelanjutan. Dalam penerapan *corporate governance* ini ada beberapa prinsip utama yang sangat penting dan mendasar agar *corporate governance* dapat terwujud.

*Organization for Economic Corporation and Development* merumuskan bahwa ada lima prinsip utama dalam *good corporate governance* (dalam I Nyoman Tjager *et al.*, 2003), yaitu *transparency* (transparansi), *accountability* (akuntabilitas), *responsibility* (pertanggungjawaban), *independency* (kemandirian) dan *fairness* (kewajaran). Transparansi yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. Akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Pertanggungjawaban yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi. Kemandirian merupakan suatu keadaan dimana perusahaan dikelola

secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Kewajaran yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di Indonesia, prinsip-prinsip *good corporate governance* yang dirumuskan oleh *Forum for Corporate Governance in Indonesia* meliputi empat hal (dalam I Nyoman Tjager *et al.*, 2003), yaitu *fairness* (kewajaran), *transparency* (transparansi), *accountability* (akuntabilitas) dan *responsibility* (tanggung jawab).

#### 1. Prinsip kewajaran

Kewajaran berarti adanya perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham minoritas dan *stakeholder* lainnya dari rekayasa-rekayasa dan transaksi yang bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Perlindungan terhadap kepentingan para pemegang saham dapat diwujudkan melalui penyajian laporan keuangan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum. Jaminan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar diberikan oleh auditor independen melalui opini yang diberikan pada paragraf pendapat dalam laporan audit setelah auditor independen yang bersangkutan menyelesaikan pekerjaan lapangan dalam proses audit laporan keuangan, karena auditor yang independen dapat memberikan kepastian terhadap integritas angka-angka akuntansi yang dihasilkan oleh *auditee*. Hasil audit dari auditor independen dapat menunjukkan kualitas laporan keuangan. Menurut Mulyadi (2002), ada 4 standar pelaporan yang terdapat dalam standar auditing, yaitu :

- a. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum di Indonesia.
- b. Laporan auditor harus menyatakan, jika ada, ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.
- c. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.
- d. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak diberikan.

Dalam memberikan pendapatnya, auditor dapat memilih tipe pendapat yang akan dinyatakan atas laporan keuangan auditan, yaitu (Mulyadi, 2002) :

- a. Pendapat wajar tanpa pengecualian  
Pendapat ini diberikan bila laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum di Indonesia.
- b. Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan yang ditambahkan dalam laporan audit baku  
Pendapat ini diberikan jika keadaan tertentu mengharuskan auditor untuk menambahkan suatu paragraf penjelasan dalam laporan audit meskipun tidak memengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan auditan.
- c. Pendapat wajar dengan pengecualian  
Pendapat ini diberikan jika laporan keuangan disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas

tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia, kecuali untuk hal-hal yang dikecualikan.

d. Pendapat tidak wajar

Pendapat ini diberikan jika laporan keuangan disajikan secara tidak wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia.

e. Pernyataan tidak memberikan pendapat

Pendapat ini diberikan jika auditor tidak melaksanakan audit dengan ruang lingkup yang memadai yang memungkinkan auditor memberikan pendapat atas laporan keuangan. Pendapat ini juga dapat diberikan jika auditor tidak independen dalam hubungannya dengan klien.

2. Prinsip transparansi

Transparansi berarti meningkatkan keterbukaan melalui penyampaian informasi yang lengkap, jelas dan akurat serta disampaikan tepat pada waktunya. Adanya keterbukaan informasi dapat mengurangi terjadinya asimetri informasi antara *agent* dan *principal*. Informasi-informasi mengenai keuangan perusahaan disajikan dalam laporan tahunan yang dilaporkan oleh perusahaan kepada Bapepam. Laporan tahunan dikatakan lengkap apabila terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Agar laporan tahunan tersebut relevan bagi para pemakai dalam proses pengambilan keputusan, maka laporan tahunan tersebut harus disampaikan tepat pada waktunya. Ketepatan penyampaian laporan keuangan diatur dalam Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, dimana dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa perusahaan *go public* diwajibkan menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan yang telah terdaftar di Bapepam selambat-lambatnya 120 hari terhitung sejak tanggal berakhirnya tahun

buku. Selain laporan yang bersifat keuangan, keterbukaan informasi juga menyangkut adanya pengungkapan informasi yang bersifat non keuangan. Sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam Nomor : Kep-38/PM/1996, informasi-informasi non keuangan terdiri dari :

a. Laporan manajemen

Laporan manajemen terdiri dari penjelasan umum dan penjelasan khusus. Penjelasan umum memuat sambutan dari komisaris dan direksi, informasi mengenai perkembangan perusahaan, uraian mengenai perkembangan perusahaan, uraian mengenai aspek pemasaran atas produk dan jasa perusahaan, riwayat hidup direksi dan komisaris perusahaan, dan informasi lain yang bersifat umum yang berkaitan dengan hal-hal yang ingin dicapai di masa depan. Penjelasan khusus memuat lokasi dan jenis aktiva tetap berwujud, nama bursa dimana efek diperdagangkan, harga saham tertinggi dan terendah, pernyataan mengenai kebijakan deviden, realisasi penggunaan dana dan informasi yang material.

b. Ikhtisar data keuangan penting

Perusahaan menyajikan informasi perbandingan selama 5 (lima) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 5 (lima) tahun.

c. Analisis dan pembahasan umum oleh manajemen.

Perusahaan memberikan uraian singkat yang membahas dan menganalisis laporan keuangan dan informasi lain dengan penekanan pada perubahan-perubahan material yang terjadi sejak laporan tahunan terakhir atau sejak pernyataan pendaftaran diajukan.

3. Prinsip akuntabilitas

Akuntabilitas berarti adanya pengawasan yang efektif yang dilakukan oleh dewan komisaris. Untuk meningkatkan kinerjanya, dewan komisaris dibantu oleh komite audit. Dalam pelaksanaan tugasnya, komite audit mempunyai fungsi membantu dewan komisaris untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan, meningkatkan efektivitas fungsi internal audit maupun eksternal audit dan mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris. Berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan oleh Bapepam pada tanggal 5 Mei 2000 tentang komite audit, ketentuan-ketentuan bagi perusahaan publik dalam membentuk komite audit adalah sebagai berikut :

a. Struktur komite audit

- Anggota komite audit diangkat dan dibentuk oleh dewan komisaris
- Komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota dan salah satu dari anggota tersebut merupakan komisaris independen emiten atau perusahaan publik, sedangkan anggota lainnya merupakan pihak ekstern yang independen
- Anggota komite audit yang berasal dari komisaris perusahaan bertindak sebagai ketua komite audit

b. Persyaratan keanggotaan

- Pihak ekstern yang diangkat menjadi anggota komite audit tidak mempunyai hubungan usaha maupun hubungan afiliasi dengan perusahaan, direktur, komisaris atau pemegang saham utama
- Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai dalam bidang tugasnya serta mampu berkomunikasi dengan baik

- Salah seorang dari anggota komite audit memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan

c. Tugas komite audit

Komite audit bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal-hal disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian komisaris yang antara lain meliputi :

- Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya
- Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan undang-undang di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan
- Melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik untuk memastikan semua risiko yang penting telah dipertimbangkan

d. Rapat komite audit

- Komite audit wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya dalam 3 (tiga) bulan
- Rapat komite audit sekurang-kurangnya dihadiri oleh  $\frac{2}{3}$  dari jumlah anggota
- Pengambilan keputusan harus disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  jumlah anggota komite audit yang hadir

e. Tanggung jawab pelaporan



- Komite audit bertanggung jawab kepada dewan komisaris atas pelaksanaan tugas yang telah ditentukan
- Komite audit wajib membuat laporan kepada dewan komisaris atas setiap penugasan yang diberikan

f. Masa tugas

Masa tugas anggota komite audit tidak boleh lebih lama dari masa tugas komisaris perusahaan.

4. Prinsip tanggung jawab

Tanggung jawab berarti perusahaan memiliki tanggung jawab untuk mematuhi hukum dan ketentuan/peraturan yang berlaku, termasuk tanggap terhadap lingkungan dimana perusahaan berada. Hal ini berarti bahwa tanggung jawab manajemen tidak hanya terbatas atas pengelolaan dana dalam perusahaan kepada investor dan kreditor, tetapi juga meliputi dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan terhadap lingkungan alam dan sosialnya (Diana Zuhroh dan Sukmawati, 2003) karena perusahaan merupakan anggota masyarakat yang bertindak dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat sekitarnya. Secara implisit Ikatan Akuntan Indonesia menjelaskan bahwa laporan tahunan juga harus dapat mengakomodasi kepentingan para pengambil keputusan. Penjelasan tersebut dituangkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 1 (Revisi 1998) paragraf kesembilan, yaitu :

“Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (value added statement), khususnya bagi industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting”

Kepedulian perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan disekitarnya meliputi empat tema (Diana Zuhroh dan Sukmawati, 2003), yaitu :

a. Kemasyarakatan

Tema ini mencakup aktivitas kemasyarakatan yang diikuti oleh perusahaan, misalnya aktivitas yang terkait dengan kesehatan, pendidikan dan seni, serta pengungkapan aktivitas kemasyarakatan lainnya.

b. Ketenagakerjaan

Tema ini meliputi dampak aktivitas perusahaan pada orang-orang dalam perusahaan tersebut. Aktivitas tersebut meliputi rekrutmen, program pelatihan, gaji dan tunjangan, mutasi dan promosi, dan lainnya.

c. Produk dan konsumen

Tema ini melibatkan aspek kualitatif suatu produk atau jasa, antara lain kegunaan, *durability*, pelayanan, kepuasan pelanggan, kejelasan/kelengkapan isi pada kemasan, dan lainnya.

d. Lingkungan hidup

Tema ini meliputi aspek lingkungan dari proses produksi yang meliputi pengendalian polusi dalam menjalankan operasi bisnis, pencegahan dan perbaikan kerusakan lingkungan akibat pemrosesan sumber daya alam dan konversi sumber daya alam.

Penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam suatu perusahaan merupakan tanggung jawab bersama antara pemegang saham, dewan direksi dan dewan komisaris karena pada intinya *corporate governance* merupakan suatu sistem, proses, dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terutama dalam hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi demi tercapainya tujuan organisasi. *Corporate governance* dimaksudkan untuk mengatur hubungan-hubungan ini dan mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan yang signifikan dalam strategi korporasi dan untuk memastikan bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dengan segera. *Corporate governance* diperlukan untuk mengendalikan perilaku pengelola

perusahaan agar bertindak tidak hanya menguntungkan dirinya sendiri, tetapi juga menguntungkan pemilik perusahaan, atau dengan kata lain untuk menyamakan kepentingan antara pemilik perusahaan dengan pengelola perusahaan (Tri Gunarsih, 2003).

## **Kerangka Pemikiran Teoritis dan Perumusan Hipotesis**

### **2.2.1. Kewajaran dan Manajemen Laba**

Prinsip kewajaran menekankan pada adanya jaminan perlindungan hak-hak para pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas (Nila Tristiarini, 2005) dan *stakeholder* lainnya dari rekayasa-rekayasa dan transaksi yang bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku (Listyorini, 2001). Perlindungan terhadap kepentingan para pemegang saham dapat diwujudkan melalui penyajian laporan keuangan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum. Namun demikian, pemilik memerlukan jaminan bahwa laporan keuangan yang merupakan laporan pertanggungjawaban manajemen memang menggambarkan konsekuensi keputusan manajemen dan kinerja mereka (Soegiharto, 2005). Mengacu pada *best practice good corporate governance*, diperlukan peranan dari akuntan independen untuk memberikan keyakinan atas kualitas informasi keuangan dengan memberikan pendapat yang independen atas kewajaran penyajian laporan keuangan (Nila Tristiarini, 2005). Keberadaan akuntan publik (akuntan independen) pun pada dasarnya merupakan keharusan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas pasal 59 ayat 1, yaitu bahwa direksi wajib menyerahkan perhitungan tahunan kepada akuntan publik. Akuntan publik melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan publik dengan tujuan tanggung jawab perlindungan kepentingan publik merupakan legitimasi hukum (Nila Tristiarini,

2005).. Akuntan publik “disewa” oleh pemegang saham untuk menguji kualitas laporan keuangan yang disajikan direksi (Helli, 2001 dalam Nila Tristiarini, 2005).

Perusahaan yang menerapkan prinsip kewajaran dianggap menyajikan secara wajar posisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan. Kewajaran laporan keuangan tercermin dari opini yang diberikan oleh auditor independen yang melakukan audit terhadap laporan keuangan yang disajikan (Nila Tristiarini, 2005). Perusahaan yang telah menerapkan prinsip kewajaran dalam pengelolaan perusahaannya umumnya akan menyajikan laporan keuangannya secara wajar, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan kurang mengindikasikan adanya manajemen laba. Hipotesis yang dirumuskan adalah :

H<sub>1</sub> : Prinsip kewajaran berhubungan negatif dengan manajemen laba

### **2.2.2. Transparansi dan Manajemen Laba**

Asimetri informasi yang terjadi antara manajer dan pemegang saham sebagai pengguna laporan keuangan menyebabkan pemegang saham tidak dapat mengamati seluruh kinerja dan prospek perusahaan secara sempurna. Dalam situasi dimana pemegang saham memiliki informasi yang lebih sedikit dari manajer, manajer dapat menggunakan fleksibilitas yang dimilikinya untuk melakukan manajemen laba. Asimetri informasi akan berkurang jika informasi yang diungkapkan semakin lengkap. Berkurangnya asimetri informasi akan menyebabkan berkurangnya fleksibilitas pihak manajemen untuk melakukan manajemen laba (Sylvia Veronica dan Yanivi S. Bachtiar, 2003). Dye (1988) dan Trueman dan Titman (1988) menunjukkan bahwa adanya asimetri informasi antara manajemen dan pemegang saham merupakan kondisi yang memungkinkan dilakukannya manajemen laba. Welker (1995) membuktikan secara empiris bahwa asimetri informasi akan berkurang apabila tingkat pengungkapan informasi meningkat. Sementara itu,

Richardson (1998) membuktikan bahwa asimetri informasi berhubungan positif dengan tingkat manajemen laba.

Asimetri informasi juga akan berkurang jika informasi disampaikan secara tepat waktu (Kim dan Verrechia, 1994 dalam Rachmat Saleh, 2004). Ketepatan waktu dalam penyampaian informasi keuangan sangat diperlukan agar informasi tersebut relevan bagi para pengambil keputusan. Ketepatan waktu mengimplikasikan bahwa laporan keuangan seharusnya disajikan pada suatu interval waktu, untuk menjelaskan perubahan dalam perusahaan yang mungkin mempengaruhi pemakai informasi dalam membuat prediksi dan keputusan (Hendriksen, 1992). Apabila informasi tidak disampaikan tepat pada waktunya, informasi tersebut akan kehilangan nilai dalam mempengaruhi kualitas keputusan. Nilai dari ketepatan waktu pelaporan keuangan merupakan determinan penting bagi tingkat kemanfaatan laporan tersebut (Givoly dan Palmon, 1982 dalam Rachmat Saleh, 2004). Sebaliknya, manfaat laporan keuangan akan berkurang jika laporan tersebut tidak tersedia pada waktunya (IAI, 2001). Dyer dan McHugh (1975, dalam Rachmat Saleh, 2004) dalam penelitiannya menyatakan bahwa banyak pihak percaya jika ketepatan waktu laporan keuangan merupakan karakteristik bagi laporan keuangan. Ketepatan waktu pelaporan merupakan elemen pokok bagi catatan laporan keuangan yang memadai, sedangkan keterlambatan pelaporan dianggap sebagai pertanda yang buruk bagi perusahaan.

Perusahaan yang menerapkan prinsip transparansi akan mengungkapkan informasi yang lebih banyak dan tepat waktu, dimana informasi-informasi yang disajikan dapat memberikan gambaran mengenai kinerja perusahaan yang bersangkutan, sehingga dapat mengurangi terjadinya asimetri informasi antara pemilik dan pengelola perusahaan. Perusahaan yang mengungkapkan informasi yang lebih banyak menunjukkan kinerja perusahaan yang baik (Verrechia, 1990 dalam

Sylvia Veronica dan Yanivi S. Bachtiar, 2003), sehingga mengurangi kemungkinan bagi pihak manajemen untuk melakukan manajemen laba. Dengan demikian, semakin banyak informasi yang disampaikan, akan semakin kecil kemungkinannya bagi manajemen perusahaan untuk melakukan manajemen laba. Hipotesis yang dirumuskan adalah :

H<sub>2</sub> : Prinsip transparansi berhubungan negatif dengan manajemen laba

### **2.2.3. Akuntabilitas dan Manajemen Laba**

Pemberian tugas dan wewenang kepada dewan direksi untuk mengelola perusahaan dari rapat umum pemegang saham mengakibatkan seluruh pengelolaan perusahaan dilakukan oleh dewan direksi. Oleh karena itu, agar dewan direksi tidak melampaui wewenang dalam menjalankan tugasnya, diperlukan pengawasan. Tugas dan wewenang untuk mengawasi dewan direksi dalam mengelola perusahaan diberikan kepada dewan komisaris oleh para pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham. Untuk meningkatkan kinerjanya, dewan komisaris dibantu oleh komite audit, dimana komite audit ini merupakan pihak ekstern yang independen dan tidak mempunyai hubungan usaha maupun hubungan afiliasi dengan perusahaan, Direktur, Komisaris atau Pemegang Saham Utama.

Beberapa penelitian telah membuktikan peran komite audit dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. DeFond dan Jiambalvo (1991) membuktikan bahwa perusahaan yang memiliki kesalahan akuntansi lebih sedikit kemungkinannya memiliki komite audit yang independen. Konsisten dengan penelitian tersebut, penelitian yang dilakukan oleh McMullen dan Raghunandan (1996) membuktikan bahwa perusahaan yang memiliki komite audit yang sebagian besar anggotanya berasal dari pihak eksternal perusahaan dan sering mengadakan rapat cenderung tidak mengalami masalah dalam pelaporan keuangannya.

Beasley *et al.* (2000) juga meneliti hubungan antara komite audit dan manajemen laba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komposisi komite audit berbeda antara perusahaan yang tidak melakukan kecurangan pelaporan keuangan dengan perusahaan yang melakukan kecurangan pelaporan pada industri yang sama. Anggota komite audit dari pihak eksternal perusahaan lebih sedikit untuk perusahaan yang melakukan kecurangan dibandingkan dengan perusahaan yang tidak melakukan kecurangan. Independensi komite audit perusahaan yang melakukan kecurangan lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang tidak melakukan kecurangan. Komite audit dari perusahaan yang tidak melakukan kecurangan lebih sering mengadakan rapat dibandingkan perusahaan yang melakukan kecurangan.

Sedangkan Chtorou *et al.* (2001) membuktikan bahwa perusahaan yang memiliki komite audit dengan mandat yang jelas untuk pengawasan dan pemantauan pelaporan keuangan, serta proporsi anggota luar yang tinggi memiliki kemungkinan yang lebih kecil untuk melakukan manajemen laba. Penelitian Chtorou juga membuktikan bahwa komite audit yang melakukan rapat lebih dari dua kali tiap tahun memiliki tingkat manajemen laba yang rendah.

Dengan demikian komite audit yang independen memiliki peran yang sangat penting dalam suatu perusahaan, terutama untuk mengurangi adanya tindakan manajemen laba yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan (Linda Kusumaning Wedari, 2004). Hipotesis yang dirumuskan adalah :

H<sub>3</sub> : Prinsip akuntabilitas berhubungan negatif dengan manajemen laba

#### **2.2.4. Responsibilitas dan Manajemen Laba**

Tanggung jawab manajemen tidak hanya terbatas atas pengelolaan dana perusahaan, tetapi juga meliputi dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan terhadap lingkungan alam dan sosialnya (Diana Zuhroh dan Sukmawati, 2003). Perusahaan

menarik dana dari berbagai individu dalam masyarakat, sehingga perusahaan harus bertanggung jawab kepada kelompok masyarakat yang terdiri atas investor dan kreditor. Perusahaan mempekerjakan sejumlah besar pegawai dan buruh, sehingga perusahaan harus bertanggung jawab kepada pekerja dan organisasinya (serikat buruh). Perusahaan memproduksi barang dan jasa untuk kepentingan konsumen, sehingga perusahaan harus bertanggung jawab kepada konsumen yang peka terhadap kualitas dan perubahan harga. Dalam beraktivitas perusahaan menggunakan sumber daya alam, menimbulkan polusi air, tanah dan udara, sehingga perusahaan harus bertanggung jawab terhadap kualitas lingkungan alam dan sosial kepada pemerintah dan masyarakat. Perusahaan sebagai bagian dari masyarakat harus memenuhi tanggung jawab sosialnya yang meliputi aspek-aspek tersebut.

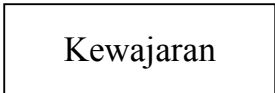
Menurut Alexander dan Bucholdz (1978 dalam Eddy R. Sembiring, 2003), manajemen yang sadar dan memperhatikan masalah sosial juga akan mengajukan kemampuan yang diperlukan untuk menggerakkan kinerja keuangan perusahaan. Adanya kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan disekitarnya akan menimbulkan pengaruh yang positif pada perilaku pengelola perusahaan, sehingga pengelola perusahaan akan mengurangi tindakan manajemen laba. Hipotesis yang dirumuskan adalah :

H<sub>4</sub> : Prinsip responsibilitas berhubungan negatif dengan manajemen laba

Kerangka pemikiran teoritis tersebut secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut :

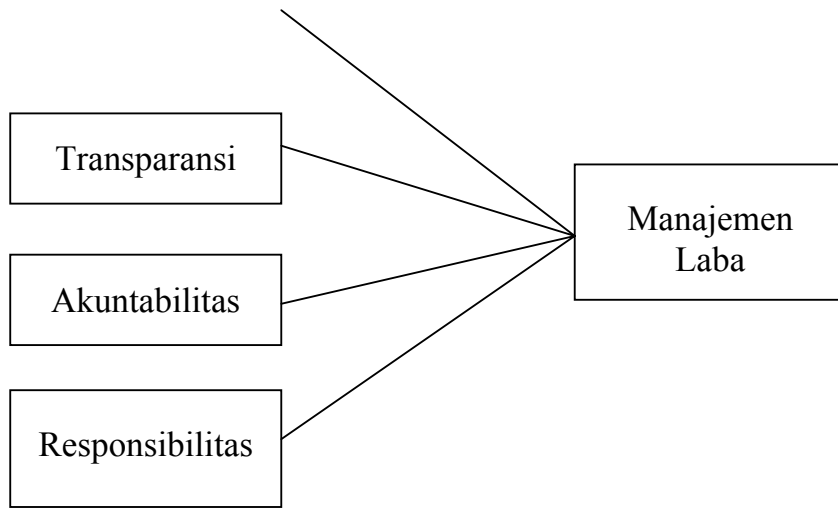
#### GAMBAR 1

#### KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS



Kewajaran





## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan dari perusahaan-perusahaan *go public* non-lembaga keuangan yang pernah mengikuti *Corporate Governance Perception Index* tahun 2001 sampai dengan tahun 2003. Laporan keuangan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahun 2002, 2003 dan 2004 karena penelitian ini akan menguji adanya indikasi manajemen laba pada laporan keuangan tahun 2003 dan 2004. Data sekunder yang lain berupa Laporan Tahunan, Laporan Audit Independen dan Susunan Komite Audit. Data-data tersebut diperoleh dari [www.jsx.co.id](http://www.jsx.co.id), pojok BEJ, *Capital Market Directory* dan pengutipan langsung Laporan Tahunan dari masing-masing perusahaan yang dikumpulkan dengan metode dokumentasi.

#### **3.2. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel**

Populasi penelitian ini adalah semua perusahaan yang sahamnya terdaftar dan diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta. Sedangkan sampel dalam penelitian ini diambil secara *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Perusahaan-perusahaan publik non keuangan yang tercatat di Bursa Efek Jakarta pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2004 dan menerbitkan laporan keuangan tahunan yang dimulai pada bulan Januari sampai bulan Desember.
- b. Pernah mengikuti survei *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) yang dilakukan oleh *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) tahun 2001 sampai dengan tahun 2004, dengan catatan perusahaan yang tidak mengikuti survei pada tahun sebelumnya dikeluarkan dari sampel karena perusahaan tersebut dianggap belum memahami konsep *good corporate governance* sehingga tidak relevan dalam penelitian ini.

Pemilihan sampel pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta yang pernah mengikuti survei *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) karena perusahaan-perusahaan tersebut mempunyai pemahaman yang baik tentang *corporate governance* dan telah melaksanakan prinsip-prinsip *corporate governance*. Perusahaan lembaga keuangan tidak dimasukkan dalam sampel penelitian karena perusahaan lembaga keuangan memiliki regulasi tersendiri yang dapat mempengaruhi variabel penelitian.

### **3.3. Definisi Operasional Variabel**

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah manajemen laba, kewajaran, transparansi, akuntabilitas dan responsibilitas.

#### **1. Manajemen laba**

Indikasi adanya manajemen laba dapat dilihat dari laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan. Deteksi atas kemungkinan dilakukannya manajemen laba dalam laporan keuangan diteliti melalui penggunaan akrual. Konsep akrual dapat dibedakan menjadi dua, yaitu *discretionary accrual* dan *non discretionary accrual*. *Discretionary accrual* adalah pengakuan akrual laba yang bebas, tidak diatur dan merupakan pilihan kebijakan manajemen. Sedangkan *non discretionary accrual* merupakan pengakuan akrual laba yang wajar yang tunduk pada suatu standar atau prinsip akuntansi yang berlaku umum. Oleh karena *non discretionary accrual* merupakan akrual yang wajar dan apabila dilanggar akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan, maka *non discretionary accrual* tidak relevan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, bentuk akrual yang dianalisis dalam penelitian ini adalah bentuk *discretionary accrual* yang merupakan akrual tidak normal dan merupakan pilihan kebijakan manajemen dalam pemilihan metode akuntansi. Nilai *discretionary accrual* (DAC) untuk mengukur tingkat

manajemen laba dihitung dengan menggunakan *Modified Jones' Model* karena modifikasi dari model Jones lebih mampu mendeteksi adanya manajemen laba (Dechow *et al.*, 1995). Model ini menggunakan *total accrual* (TAC) yang diklasifikasikan menjadi komponen *discretionary accrual* (DAC) dan *non discretionary accrual* (NDAC). Untuk mendapatkan nilai DAC, maka langkah pertama adalah mencari nilai TAC dengan rumus :

$$TAC_{it} = NI_{it} - CFO_{it} \quad (1)$$

dimana :

$TAC_{it}$  = total akrual perusahaan i pada periode t

$NI_{it}$  = laba bersih perusahaan i pada periode t

$CFO_{it}$  = arus kas dari aktivitas operasi perusahaan i pada periode t

Selanjutnya dihitung nilai *total accrual* yang diestimasi dengan persamaan regresi OLS, yaitu :

$$TAC_{it}/A_{it-1} = a_1(1/A_{it-1}) + a_2(\Delta REV_{it}/A_{it-1} - \Delta REC_{it}/A_{it-1}) + a_3(PPE_{it}/A_{it-1}) + \varepsilon_{it} \quad (2)$$

dimana :

$A_{it-1}$  = total aktiva perusahaan i pada periode t-1

$\Delta REV_{it}$  = perubahan pendapatan perusahaan i pada periode t

$\Delta REC_{it}$  = perubahan piutang bersih perusahaan i pada periode t

$PPE_{it}$  = aktiva tetap perusahaan i pada periode t

$a_1, a_2, a_3$  = koefisien regresi

Dengan menggunakan koefisien regresi di atas ( $a_1, a_2, a_3$ ), maka dapat dihitung nilai *non discretionary accrual* dengan rumus :

$$NDAC_{it} = \alpha_1(1/A_{it-1}) + \alpha_2(\Delta REV_{it}/A_{it-1} - \Delta REC_{it}/A_{it-1}) + \alpha_3(PPE_{it}/A_{it-1}) \quad (3)$$

dimana :

$NDAC_{it}$  = nilai non discretionary accrual perusahaan i pada periode t

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 = \text{Fitted coefficient}$  yang diperoleh dari hasil regresi persamaan (2)

*Discretionary accrual* merupakan bagian dari *total accrual* yang diperoleh dari estimasi *total accrual* dan dihitung sebagai berikut :

$$TAC_{it}/A_{it-1} = NDAC_{it} + DAC_{it} \quad (4)$$

$$DAC_{it} = TAC_{it}/A_{it-1} - NDAC_{it}$$

(5)

$$DAC_{it} = TAC_{it}/A_{it-1} - \{\alpha_1(1/A_{it-1}) + \alpha_2(\Delta REV_{it}/A_{it-1} - \Delta REC_{it}/A_{it-1}) + \alpha_3(PPE_{it}/A_{it-1})\}$$

(6)

dimana :

$DAC_{it}$  = nilai *discretionary accrual* perusahaan i pada periode t

Apabila perusahaan tidak melakukan manajemen laba, maka total akrual akan sama dengan *non discretionary accrual*. Apabila perusahaan diindikasikan melakukan manajemen laba, maka nilai *discretionary accrual* akan positif.

## 2. Kewajaran

Prinsip kewajaran tercermin dengan adanya pendapat dari auditor independen (Nila Tristiarini, 2005). Pendapat auditor independen yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendapat auditor independen atas laporan keuangan perusahaan tahun 2003 dengan alasan pendapat auditor independen atas laporan keuangan tahun 2003 akan dijadikan sebagai acuan oleh perusahaan dalam penyajian laporan keuangan tahun berikutnya. Ada lima pendapat yang dapat diberikan oleh auditor independen atas laporan keuangan yang diauditnya (Mulyadi, 2002). Pendapat dari auditor independen tersebut diberi bobot sebagai berikut :

- a. Pendapat wajar tanpa pengecualian, diberi bobot 5 (lima)
- b. Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan, diberi bobot 4 (empat)

- c. Pendapat wajar dengan pengecualian, diberi bobot 3 (tiga)
- d. Pendapat tidak wajar, diberi bobot 2 (dua)
- e. Pernyataan tidak memberikan pendapat, diberi bobot 1 (satu)

### 3. Transparansi

Prinsip transparansi tercermin dengan adanya keterbukaan informasi mengenai perusahaan yang disampaikan dengan benar dan tepat pada waktunya (Nila Tristiarini, 2005). Informasi-informasi mengenai transparansi perusahaan disajikan dalam laporan tahunan yang dilaporkan oleh perusahaan kepada Bapepam. Laporan tahunan yang diteliti terdiri dari :

#### a. Kelengkapan laporan keuangan

Sesuai dengan keputusan Ketua Bapepam Nomor : Kep-38/PM/1996, laporan keuangan yang lengkap terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Apabila perusahaan menyajikan laporan keuangan secara lengkap, maka masing-masing komponen dari laporan keuangan tersebut akan diberi bobot 1 (satu), sehingga bila perusahaan menyajikan laporan keuangan secara lengkap akan diberi bobot 5 (lima).

#### b. Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan

Berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-38/PM/1996, laporan keuangan disampaikan tepat pada waktunya bila diserahkan selambat-lambatnya 120 hari setelah tahun buku perusahaan berakhir. Apabila perusahaan menyampaikan laporan keuangan tepat pada waktunya, akan diberi bobot 1 (satu).

#### c. Kelengkapan laporan non keuangan

Selain laporan yang bersifat keuangan, keterbukaan informasi juga menyangkut adanya pengungkapan informasi yang bersifat non keuangan.

Sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam Nomor : Kep-38/PM/1996, kelengkapan laporan keuangan terdiri dari laporan manajemen, ikhtisar data keuangan penting, dan analisis dan pembahasan umum oleh manajemen. Apabila perusahaan mengungkapkan informasi yang bersifat non keuangan tersebut, untuk masing-masing laporan yang disampaikan akan diberi bobot 1 (satu), sehingga apabila perusahaan mengungkapkan semua informasi non keuangan sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam tersebut akan diberi bobot 3 (tiga).

#### 4. Akuntabilitas

Akuntabilitas akan tercipta bila ada pengawasan yang efektif, dimana fungsi pengawasan ini dilaksanakan oleh komite audit sesuai dengan Surat Edaran dari Bapepam Nomor: SE-03/PM/2000 (Nila Tristiarini, 2005). Apabila perusahaan memiliki komite audit yang lengkap sesuai ketentuan (terdiri dari 3 orang dan dipimpin oleh seorang komisaris independen) diberi bobot 1 (satu). Apabila perusahaan mengumumkan laporan komite audit dalam laporan tahunan, akan diberikan bobot 1 (satu). Apabila komite audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya dalam 3 bulan, akan diberi bobot 1 (satu). Dengan demikian, apabila perusahaan memenuhi semua komponen dalam variabel ini akan diberi bobot 3 (tiga). Informasi-informasi mengenai akuntabilitas perusahaan disajikan dalam laporan tahunan yang dilaporkan oleh perusahaan kepada Bapepam.

#### 5. Responsibilitas

Tanggung jawab perusahaan terwujud dengan adanya kepedulian perusahaan terhadap masyarakat di sekitarnya, karena perusahaan merupakan salah satu anggota masyarakat, dan oleh karenanya harus bertindak dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat sekitarnya. Tanggung jawab perusahaan terdiri dari kendali mutu dan standarisasi, uraian keikutsertaan perusahaan dalam

kegiatan pelayanan dan program kemasyarakatan, pengembangan sumber daya manusia dan lingkungan hidup (Nila Tristiarini, 2005), atau dengan kata lain, kepedulian perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan disekitarnya meliputi empat tema, yaitu produk dan konsumen, kemasyarakatan, ketenagakerjaan, dan lingkungan hidup (Diana Zuhroh dan Sukmawati, 2003). Pengungkapan atas tema-tema tersebut dalam laporan tahunan akan diberi bobot 1 (satu) untuk masing-masing tema, sehingga apabila perusahaan mengungkapkan semua tema dalam laporan tahunannya akan diberi bobot 4 (empat). Informasi-informasi mengenai tanggung jawab perusahaan disajikan dalam laporan tahunan yang dilaporkan oleh perusahaan kepada Bapepam.

#### **3.4. Teknik Analisis**

Pengujian hipotesis dilakukan secara statistik dengan menggunakan analisis korelasi Pearson untuk menguji hubungan antara dua variabel. Arah hubungan dari variabel-variabel tersebut dapat dilihat dari angka korelasinya ( $r$ ) yang berkisar antara -1 sampai +1 dengan kriteria penilaian sebagai berikut :

- a. Jika nilai  $r > 0$ , artinya telah terjadi hubungan yang linear positif, yaitu makin besar nilai variabel X (independen), makin besar pula nilai variabel Y (dependen), atau sebaliknya, makin kecil nilai variabel X (independen), makin kecil pula nilai variabel Y (dependen).
- b. Jika nilai  $r < 0$ , artinya telah terjadi hubungan yang linear negatif, yaitu makin kecil nilai variabel X (independen), makin besar nilai variabel Y (dependen), atau sebaliknya, makin besar nilai variabel X (independen), makin kecil nilai variabel Y (dependen).



- c. Jika nilai  $r = 0$ , artinya tidak ada hubungan sama sekali antara variabel X (independen) dan variabel Y (dependen).
- d. Jika nilai  $r = 1$  atau  $r = -1$  telah terjadi hubungan linear sempurna, sedangkan untuk nilai  $r$  yang makin mengarah ke angka 0, maka hubungan makin melemah.

Setelah didapat angka korelasi, dilakukan pengujian apakah angka korelasi yang didapat benar-benar signifikan atau dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan dua variabel atau tidak. Pengujian dilakukan pada dua sisi karena akan dicari ada atau tidak ada hubungan/korelasi, dan bukan lebih besar/kecil. Dasar dalam pengambilan keputusan adalah sebagai berikut :

- a. Berdasarkan probabilitas
  - Jika probabilitas  $> 0,05$ , maka  $H_0$  diterima
  - Jika probabilitas  $< 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak
- b. Berdasarkan tanda \* yang ada dalam *output* SPSS

Signifikan tidaknya korelasi dua variabel dapat dilihat dari adanya tanda \* pada pasangan data yang dikorelasikan. Jika pada *output* SPSS terdapat tanda \*, maka dapat disimpulkan bahwa kedua variabel tersebut berkorelasi secara signifikan.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

#### **3.5. Deskripsi Objek Penelitian**

Bursa Efek Jakarta adalah salah satu bursa saham yang dapat memberikan peluang investasi dan sumber pembiayaan dalam upaya mendukung pembangunan ekonomi nasional. Bursa Efek Jakarta juga berperan dalam upaya mengembangkan pemodal lokal yang besar dan solid untuk menciptakan pasar modal Indonesia yang stabil.

Sejarah Bursa Efek Jakarta berawal dari berdirinya bursa efek di Indonesia pada abad ke-19. Pada tahun 1912, dengan bantuan pemerintah kolonial Belanda, bursa efek pertama didirikan di Batavia, pusat pemerintah kolonial Belanda dan saat ini dikenal sebagai Jakarta. Bursa Batavia sempat ditutup selama periode perang dunia pertama dan kemudian dibuka lagi pada 1925. Selain Bursa Batavia, pemerintah kolonial juga mengoperasikan Bursa Paraler di Surabaya dan Semarang. Namun kegiatan bursa ini dihentikan lagi ketika terjadi pendudukan oleh tentara Jepang di Batavia. Pada tahun 1952, tujuh tahun setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, bursa saham dibuka lagi di Jakarta dengan memperdagangkan saham dan obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan Belanda sebelum perang dunia. Kegiatan bursa saham berhenti lagi ketika pemerintah meluncurkan program nasionalisasi pada tahun 1956, dan tidak sampai 1977, bursa saham kembali dibuka dan ditangani oleh Badan Pelaksana Pasar Modal (Bapepam), institusi baru dibawah Departemen Keuangan. Kegiatan perdagangan dan kapitalisasi pasar saham pun mulai meningkat dan mencapai puncaknya tahun 1990 seiring dengan perkembangan pasar finansial dan sektor swasta.

Pada tanggal 13 Juli 1992, bursa saham diswastanisasi menjadi PT Bursa Efek Jakarta (BEJ). Swastanisasi Bursa Saham menjadi PT BEJ ini mengakibatkan beralihnya fungsi Bapepam menjadi Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepom). Tahun 1995 adalah tahun BEJ memasuki babak baru. Pada tanggal 22 Mei 1995, BEJ meluncurkan *Jakarta Automated Trading System (JATS)*, sebuah sistem perdagangan otomatis yang menggantikan sistem perdagangan manual. Sistem baru ini dapat memfasilitasi perdagangan saham dengan frekuensi yang lebih besar dan lebih menjamin kegiatan pasar yang *fair* dan transparan dibanding sistem perdagangan manual.

Objek penelitian adalah perusahaan-perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta dan pernah mengikuti survei *Corporate Governance Perception Index (CGPI)* tahun 2001 sampai dengan 2004 yang dilakukan oleh *The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG)* dengan catatan perusahaan yang tidak mengikuti survei pada tahun sebelumnya dikeluarkan dari sampel karena perusahaan tersebut dianggap belum memahami konsep *good corporate governance*. Selain itu, dua perusahaan dikeluarkan dari sampel karena ada 1 perusahaan yang pada tahun 2004 sudah tidak tercatat di BEJ (Karunia Kapuas Utama), sedangkan yang lain dikeluarkan dari sampel karena menerbitkan laporan keuangan tahunan lebih dari 12 bulan (Komatsu Indonesia). Dengan kriteria tersebut, jumlah perusahaan yang dapat dijadikan sampel dalam penelitian ini sebanyak 42 perusahaan untuk tahun 2003 dan 49 perusahaan untuk tahun 2004.

Pada tahun 2001 survei diikuti oleh 52 perusahaan yang terdiri dari 43 perusahaan non keuangan dan 9 perusahaan keuangan. Untuk tahun 2002 tidak ada kejelasan data mengenai perusahaan-perusahaan yang mengikuti survei ini sehingga untuk tahun ini diabaikan. Pada tahun 2003 survei diikuti oleh 31 perusahaan yang terdiri dari 23 perusahaan non keuangan dan 8 perusahaan

keuangan, sedangkan pada tahun 2004 survei diikuti oleh 22 perusahaan yang terdiri dari 13 perusahaan non keuangan dan 9 perusahaan keuangan.

Perusahaan-perusahaan yang dijadikan sampel dan keikutsertaan mereka dalam survei pemeringkatan *Corporate Governance Perception Index* dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2004 dapat dilihat pada halaman berikutnya (Tabel 1). Sedangkan perusahaan-perusahaan yang dijadikan sampel dan masuk dalam 5 besar dalam pemeringkatan tersebut untuk tahun 2003 adalah Astra International, Astra Graphia, Medco Energi International, Kalbe Farma dan Dankos Laboratories. Untuk tahun 2004 adalah Astra International, Dankos Laboratories, Astra Agro Lestari, Astra Graphia dan Kalbe Farma.

TABEL 1  
PERUSAHAAN-PERUSAHAAN YANG DITELITI

No.	Kode	Emiten	2001	2003	2004
1	ADHI	Adhi Karya	-	-	v
2	ALFA	Alfa Retailindo	v	-	-
3	ANTM	Aneka Tambang	v	v	v
4	ACAP	Andhi Chandra Automotive	-	v	-
5	APEX	Apexindo Pratama Duta	-	-	v
6	AALI	Astra Agro Lestari	v	v	v
7	ASGR	Astra Graphia	v	v	v
8	ASII	Astra Internasional	v	v	v
9	AUTO	Astra Otoparts	v	v	-
10	BASS	Bahtera Adimina Samudera	v	-	-
11	BRPT	Barito Pacific Timber	v	-	-
12	RMBA	Bentoe International Investama	v	v	-
13	BMTR	Bimantara Citra	v	v	v
14	BUDI	Budi Acid Jaya	v	-	-
15	CPIN	Charoen Pokphand Indonesia	v	-	-
16	CMNP	Citra Marga Nusapala Persada	v	v	v
17	DNKS	Dankos Laboratories	v	v	v
18	PASW	Fajar Surya Wisesa	v	-	-
19	GJTL	Gajah Tunggal	v	-	-
20	GEMA	Gema Graha Sarana	-	v	-
21	GGRM	Gudang Garam	v	-	-
22	HMSP	HM Sampoerna	v	-	-
23	HITS	Humpuss Intermoda Transportasi	-	v	-
24	INKP	Indah Kiat Pulp & Paper	v	-	-
25	INTP	Indocement Tunggal Prakarsa	v	-	-
26	INDF	Indofood Sukses Makmur	v	-	-
27	INDR	Indorama Synthetics	v	-	-
28	ISAT	Indonesian Satellite Corp.	v	v	-
29	INCO	International Nickel Indonesia	-	v	-
30	JIHD	Jakarta International Hotel & Development	v	-	-
31	KBLM	Kabelindo Murni	-	v	-
32	KLBF	Kalbe Farma	v	v	v
33	KKGI	Karunia Kapuas Utama	-	v	-
34	KAEF	Kimia Farma	-	-	v
35	KOMI	Komatsu Indonesia	v	-	-
36	LTLS	Lautan Luas	v	-	-
37	LPLI	Lippo E-net	v	-	-
38	MPPS	Matahari Putra Prima	v	-	-
39	MEDC	Medco Energi International	v	v	v
40	MTDL	Metrodata Elektronik	v	-	-
41	MLIA	Mulia Industrindo	v	-	-
42	MLPL	Multipolar	v	v	-
43	TKIM	Pabrik Kertas Tjiwi Kimia	v	-	-
44	TMAS	Pelayaran Tempuran Emas	-	v	-
45	LSIP	PP London Sumatera Plantation	v	-	-
46	RALS	Ramayana Lestari Santosa	v	-	-
47	SMCB	Semen Cibinong	v	-	-
48	SMGR	Semen Gresik	v	v	-
49	PTBA	Tambang Batubara Bukit Asam	-	-	v
50	TLKM	Telekomunikasi Indonesia	v	-	-
51	TSPC	Tempo Scan Pacifik	v	-	-
52	TINS	Timah	v	-	-
53	ULTJ	Ultra Jaya	v	-	-
54	UNVR	Unilever Indonesia	-	v	-
55	UNTR	United Tractor	v	v	-

Sumber : Majalah Swasembada, 2001-2005

### 3.6. Nilai *Discretionary Accrual* sebagai Proksi Manajemen Laba

Nilai *discretionary accrual* dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan *Modified Jones' Model*. Langkah pertama untuk menentukan nilai *discretionary accrual* adalah menghitung nilai total akrual. Setelah diketahui nilai total akrualnya, dilakukan regresi, dan dari hasil regresi yang diperoleh, koefisiennya akan diambil untuk menentukan besarnya nilai *non-discretionary accrual*. Untuk mengetahui seberapa jauh hubungan penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* terhadap manajemen laba, maka pengujian dilakukan untuk tahun 2003, 2004 dan gabungan tahun 2003 dan 2004.

Dari hasil regresi yang telah dilakukan terhadap total akrual, nilai *non-discretionary accrual* untuk tahun 2003 dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut :

$$Y = -0,05690 + 0,10491X_1 + 0,1486X_2$$

dimana,

$$Y = \text{NDACit}$$

$$X_1 = (\Delta \text{REVit}/\text{Ait-1} - \Delta \text{RECit}/\text{Ait-1})$$

$$X_2 = (\text{PPEit}/\text{A}_{it-1})$$

Nilai *non-discretionary accrual* untuk tahun 2004 dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut :

$$Y = 0,00572 - 0,06352X_1 - 0,10721X_2$$

Nilai *non-discretionary accrual* untuk gabungan tahun 2003 dan 2004 dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut :

$$Y = -0,02714 - 0,00390X_1 - 0,05124X_2$$

Langkah selanjutnya adalah mencari nilai *discretionary accrual* dengan cara mencari selisih antara total akrual dan *non-discretionary accrual*. Nilai *discretionary accrual* inilah yang akan dipergunakan sebagai proksi dari manajemen laba. Nilai *discretionary accrual* untuk tahun 2003 dapat dilihat pada lampiran 3, tahun 2004 pada lampiran 7 dan gabungan tahun 2003 dan 2004 pada lampiran 10.

### 3.7. Hasil Analisis Korelasi

Analisis korelasi digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel kewajaran, transparansi, akuntabilitas dan tanggung jawab dengan variabel manajemen laba. Pengujian dilakukan dengan menggunakan program SPSS versi 11.

#### 1. Hasil analisis korelasi tahun 2003

Dari hasil pengujian hubungan antara prinsip-prinsip *good corporate governance* dan manajemen laba pada tahun 2003 diperoleh hasil sebagai berikut :

TABEL 2  
HASIL KORELASI ANTARA PRINSIP-PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DENGAN MANAJEMEN LABA TAHUN 2003

		Correlations				
		KEWAJARAN	TRANSPARANSI	AKUNTABILITAS	TANGGUNG JAWAB	DACIT
KEWAJARAN	Pearson Correlation	1	,383	-,085	-,063	,082
	Sig. (2-tailed)		,012	,592	,691	,605
	N	42	42	42	42	42
TRANSPARANSI	Pearson Correlation	,383	1	-,213	-,101	,251
	Sig. (2-tailed)	,012		,176	,525	,109
	N	42	42	42	42	42
AKUNTABILITAS	Pearson Correlation	-,085	-,213	1	,363	,026
	Sig. (2-tailed)	,592	,176		,018	,870
	N	42	42	42	42	42
TANGGUNG JAWAB	Pearson Correlation	-,063	-,101	,363	1	-,265
	Sig. (2-tailed)	,691	,525	,018		,090
	N	42	42	42	42	42
DACIT	Pearson Correlation	,082	,251	,026	-,265	1
	Sig. (2-tailed)	,605	,109	,870	,090	
	N	42	42	42	42	42

Sumber : data sekunder yang diolah, 2006

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa semua prinsip-prinsip *good corporate governance* memiliki korelasi yang lemah dengan manajemen laba. Variabel kewajaran dan manajemen laba memiliki angka korelasi 0,082, variabel transparansi dan manajemen laba memiliki angka korelasi 0,251, variabel akuntabilitas dan manajemen laba memiliki angka korelasi 0,026, sedangkan variabel tanggung jawab dan manajemen laba memiliki angka korelasi -0,265. Dari keempat prinsip dalam *good corporate governance* hanya variabel tanggung jawab yang memiliki korelasi negatif dengan manajemen laba, meskipun korelasinya masih lemah.

#### 2. Hasil analisis korelasi tahun 2004

Dari hasil pengujian hubungan antara prinsip-prinsip *good corporate governance* dan manajemen laba pada tahun 2004 diperoleh hasil sebagai berikut :

TABEL 3

HASIL KORELASI ANTARA PRINSIP-PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DENGAN MANAJEMEN LABA TAHUN 2004

		Correlations				
		KEWAJARAN	TRANSPARANSI	AKUNTABILITAS	RESPONSIBILITAS	DACIT
KEWAJARAN	Pearson Correlation	1	,382	-,113	-,018	-,043
	Sig. (2-tailed)		,007	,438	,904	,769
	N	49	49	49	49	49
TRANSPARANSI	Pearson Correlation	,382	1	-,135	,041	-,095
	Sig. (2-tailed)	,007		,356	,782	,518
	N	49	49	49	49	49
AKUNTABILITAS	Pearson Correlation	-,113	-,135	1	,238	,090
	Sig. (2-tailed)	,438	,356		,100	,538
	N	49	49	49	49	49
RESPONSIBILITAS	Pearson Correlation	-,018	,041	,238	1	-,168
	Sig. (2-tailed)	,904	,782	,100		,249
	N	49	49	49	49	49
DACIT	Pearson Correlation	-,043	-,095	,090	-,168	1
	Sig. (2-tailed)	,769	,518	,538	,249	
	N	49	49	49	49	49

Sumber : data sekunder yang diolah, 2006

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa semua prinsip-prinsip *good corporate governance* tetap memiliki korelasi yang lemah dengan manajemen laba. Variabel kewajaran dan manajemen laba memiliki angka korelasi -0,043, variabel transparansi dan manajemen laba memiliki angka korelasi -0,095, variabel akuntabilitas dan manajemen laba memiliki angka korelasi 0,090, sedangkan variabel tanggung jawab sosial dan manajemen laba memiliki angka korelasi -0,168. Dari keempat prinsip dalam *good corporate governance* tersebut, variabel kewajaran, transparansi dan tanggung jawab sosial memiliki korelasi negatif dengan manajemen laba. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan lebih memahami prinsip-prinsip yang ada dalam *good corporate governance* daripada tahun sebelumnya meskipun korelasi antara prinsip-prinsip tersebut dan manajemen laba masih lemah.

3. Hasil analisis korelasi gabungan tahun 2003 dan 2004

Hasil pengujian hubungan antara prinsip-prinsip *good corporate governance* dan manajemen laba secara gabungan pada tahun 2003 dan 2004 dapat dilihat pada Tabel 4. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa variabel kewajaran dan manajemen laba memiliki angka korelasi -0,004, variabel transparansi dan



manajemen laba memiliki angka korelasi 0,038, variabel akuntabilitas dan manajemen laba memiliki angka korelasi 0,001, sedangkan variabel tanggung jawab sosial dan manajemen laba memiliki angka korelasi -0,241. Dari keempat prinsip dalam *good corporate governance* tersebut, variabel kewajaran dan tanggung jawab sosial memiliki korelasi negatif dengan manajemen laba, dan variabel tanggung jawab sosial memiliki korelasi negatif yang cukup kuat dengan manajemen laba.

TABEL 4  
HASIL KORELASI ANTARA PRINSIP-PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DENGAN MANAJEMEN LABA TAHUN 2003 DAN 2004

		Correlations				
		KEWAJARAN	TRANSPARANSI	AKUNTABILITAS	RESPONSIBILITAS	DACIT
KEWAJARAN	Pearson Correlation	1	,385	-,099	-,037	-,004
	Sig. (2-tailed)		,000	,348	,728	,969
	N	91	91	91	91	91
TRANSPARANSI	Pearson Correlation	,385	1	-,178	-,029	,038
	Sig. (2-tailed)	,000		,091	,787	,720
	N	91	91	91	91	91
AKUNTABILITAS	Pearson Correlation	-,099	-,178	1	,294	,001
	Sig. (2-tailed)	,348	,091		,005	,993
	N	91	91	91	91	91
RESPONSIBILITAS	Pearson Correlation	-,037	-,029	,294	1	-,241
	Sig. (2-tailed)	,728	,787	,005		,021
	N	91	91	91	91	91
DACIT	Pearson Correlation	-,004	,038	,001	-,241	1
	Sig. (2-tailed)	,969	,720	,993	,021	
	N	91	91	91	91	91

Sumber : data sekunder yang diolah, 2006

### 3.8. Hasil Pengujian Hipotesis

Dari hasil pengujian yang ditunjukkan dengan angka korelasi dan tingkat signifikansi yang diuji dengan menggunakan program SPSS versi 11 dapat diketahui hubungan antara variabel independen, yaitu kewajaran, transparansi, akuntabilitas dan tanggung jawab sosial terhadap manajemen laba sebagai berikut :

1. Hipotesis pertama ( $H_1$ ) menyatakan bahwa penerapan prinsip kewajaran berhubungan negatif dengan manajemen laba. Hasil uji korelasi untuk tahun 2003 menunjukkan bahwa  $H_0$  tidak dapat ditolak yang ditunjukkan oleh nilai

probabilitas  $(0,605) >$  derajat signifikansi  $(0,05)$  dan angka korelasi sebesar  $0,082$ . Hasil uji korelasi untuk tahun 2004 menunjukkan bahwa  $H_0$  tidak dapat ditolak yang ditunjukkan oleh nilai probabilitas  $(0,769) >$  derajat signifikansi  $(0,05)$  meskipun ada korelasi negatif yang ditunjukkan dengan angka korelasi sebesar  $-0,043$ . Sedangkan uji korelasi untuk tahun 2003 dan 2004 menunjukkan bahwa  $H_0$  tidak dapat ditolak yang ditunjukkan oleh nilai probabilitas  $(0,969) >$  derajat signifikansi  $(0,05)$  meskipun ada korelasi negatif yang ditunjukkan dengan angka korelasi sebesar  $-0,004$ .

2. Hipotesis kedua ( $H_2$ ) menyatakan bahwa penerapan prinsip transparansi berhubungan negatif dengan manajemen laba. Hasil uji korelasi untuk tahun 2003 menunjukkan bahwa  $H_0$  tidak dapat ditolak yang ditunjukkan oleh nilai probabilitas  $(0,109) >$  derajat signifikansi  $(0,05)$  dan angka korelasi sebesar  $0,251$ . Hasil uji korelasi untuk tahun 2004 menunjukkan bahwa  $H_0$  tidak dapat ditolak yang ditunjukkan oleh nilai probabilitas  $(0,518) >$  derajat signifikansi  $(0,05)$  meskipun ada korelasi negatif yang ditunjukkan dengan angka korelasi sebesar  $-0,095$ . Sedangkan uji korelasi untuk tahun 2003 dan 2004 menunjukkan bahwa  $H_0$  tidak dapat ditolak yang ditunjukkan oleh nilai probabilitas  $(0,720) >$  derajat signifikansi  $(0,05)$  dan angka korelasi sebesar  $0,038$ .
3. Hipotesis ketiga ( $H_3$ ) menyatakan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas berhubungan negatif dengan manajemen laba. Hasil uji korelasi untuk tahun 2003 menunjukkan bahwa  $H_0$  tidak dapat ditolak yang ditunjukkan oleh nilai probabilitas  $(0,870) >$  derajat signifikansi  $(0,05)$  dan angka korelasi sebesar  $0,026$ . Hasil uji korelasi untuk tahun 2004 menunjukkan bahwa  $H_0$  tidak dapat ditolak yang ditunjukkan oleh nilai probabilitas  $(0,538) >$  derajat signifikansi  $(0,05)$  dan angka korelasi sebesar  $0,090$ . Sedangkan uji korelasi untuk tahun 2003

dan 2004 menunjukkan bahwa  $H_0$  tidak dapat ditolak yang ditunjukkan oleh nilai probabilitas  $(0,993) >$  derajat signifikansi  $(0,05)$  dan angka korelasi  $0,001$ .

4. Hipotesis keempat ( $H_4$ ) menyatakan bahwa penerapan prinsip tanggung jawab berhubungan negatif dengan manajemen laba. Hasil uji korelasi untuk tahun 2003 menunjukkan bahwa  $H_0$  tidak dapat ditolak yang ditunjukkan oleh nilai probabilitas  $(0,90) >$  derajat signifikansi  $(0,05)$ . Meskipun demikian, variabel tanggung jawab berhubungan negatif dengan manajemen laba yang ditunjukkan oleh angka korelasi sebesar  $-0,265$ . Hasil uji korelasi untuk tahun 2004 menunjukkan bahwa  $H_0$  tidak dapat ditolak yang ditunjukkan oleh nilai probabilitas  $(0,249) >$  derajat signifikansi  $(0,05)$  meskipun ada korelasi negatif yang ditunjukkan dengan angka korelasi sebesar  $-0,0168$ . Sedangkan uji korelasi untuk tahun 2003 dan 2004 menunjukkan bahwa  $H_0$  ditolak yang ditunjukkan oleh nilai probabilitas  $(0,021) <$  derajat signifikansi  $(0,05)$  dan angka korelasi sebesar  $-0,241$ .

### **3.9. Analisis Hasil Penelitian**

Laporan keuangan merupakan pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya (Kerangka Dasar Penyajian dan Penyusunan Laporan Keuangan, 1994) sebagai akibat adanya pemisahan kepemilikan antara pengelola dan pemilik perusahaan. Salah satu informasi yang terdapat dalam laporan keuangan adalah informasi mengenai laba karena informasi mengenai laba sering digunakan sebagai dasar untuk pembuatan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Akan tetapi, seringkali para pengguna informasi laba tidak mempertimbangkan prosedur yang digunakan dalam menghasilkan informasi tersebut, sehingga mendorong manajer untuk melakukan manajemen laba (Beattie *et al.*, 1994) untuk memaksimalkan kepentingannya sendiri (Scott, 1997). Menurut teori

keagenan, praktik manajemen laba ini dapat diminimumkan melalui pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*), dengan menerapkan prinsip-prinsip yang ada dalam *good corporate governance*, yaitu kewajaran, transparansi, akuntabilitas dan responsibilitas.

Namun demikian, dari hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 42 perusahaan pada tahun 2003 dan 49 perusahaan pada tahun 2004 yang pernah mengikuti survey *Corporate Governance Perception Index* dari tahun 2001 sampai 2004 dapat diketahui bahwa ternyata keempat prinsip yang ada dalam *good corporate governance* tersebut tidak berhubungan secara signifikan dengan praktik manajemen laba yang dilakukan oleh manajer perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa *good corporate governance* belum sepenuhnya diterapkan di perusahaan-perusahaan tersebut.

#### 4.5.1. Analisis Hasil Pengujian Hipotesis Pertama

Hipotesis pertama ( $H_1$ ) menyatakan bahwa penerapan prinsip kewajaran berhubungan negatif dengan manajemen laba. Prinsip kewajaran dalam penelitian ini diukur dari opini kewajaran laporan keuangan dimana opini mengenai kewajaran laporan keuangan ini diberikan oleh auditor independen, karena dengan independensinya auditor independen diharapkan dapat meminimalkan tindakan manajemen laba dan meningkatkan kredibilitas informasi akuntansi dalam laporan keuangan. Dari sampel yang dipakai dalam penelitian ini, hampir sebagian besar mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Hal ini menunjukkan bahwa laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun demikian, opini yang diberikan oleh auditor independen ini belum menjamin tidak adanya manajemen laba di perusahaan, walaupun pada tahun 2004 terdapat korelasi negatif antara kewajaran dan manajemen laba.

#### 4.5.2. Analisis Hasil Pengujian Hipotesis Kedua

Hipotesis kedua ( $H_2$ ) menyatakan bahwa penerapan prinsip transparansi berhubungan negatif dengan manajemen laba. Prinsip transparansi dalam penelitian ini diukur dengan kelengkapan laporan keuangan, ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dan kelengkapan laporan non keuangan. Perusahaan yang transparan akan mengungkapkan lebih banyak informasi yang akurat dan tepat waktu sehingga mengurangi kemungkinan dilakukannya manajemen laba oleh perusahaan. Dari sampel yang dipakai dalam penelitian ini, hampir seluruhnya telah menyampaikan laporan keuangan dan non keuangan secara lengkap serta tepat pada waktunya. Namun demikian, transparansi yang dilakukan oleh perusahaan belum menjamin tidak adanya manajemen laba di perusahaan, walaupun pada tahun 2004 terdapat korelasi negatif antara transparansi dan manajemen laba.

#### 4.5.3. Analisis Hasil Pengujian Hipotesis Ketiga

Hipotesis ketiga ( $H_3$ ) menyatakan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas berhubungan negatif dengan manajemen laba. Prinsip akuntabilitas dalam penelitian ini diukur dengan keberadaan komite audit sesuai dengan ketentuan yang berlaku, adanya laporan komite audit dalam laporan tahunan dan rapat yang dilakukan oleh komite audit. Keberadaan komite audit diharapkan dapat mengurangi tindakan manajemen laba yang dilakukan oleh pihak manajemen karena komite audit melaksanakan fungsi pengawasan di perusahaan. Dari sampel yang dipakai dalam penelitian ini, sebagian besar diantaranya telah memiliki komite audit sesuai ketentuan, memuat laporan audit dalam laporan tahunan dan mengadakan rapat. Namun demikian, akuntabilitas yang dilakukan oleh perusahaan belum menjamin tidak adanya manajemen laba di perusahaan.

#### 4.5.4. Analisis Hasil Pengujian Hipotesis Keempat

Hipotesis keempat ( $H_4$ ) menyatakan bahwa penerapan prinsip tanggung jawab berhubungan negatif dengan manajemen laba. Prinsip tanggung jawab dalam penelitian ini dilihat dari kepedulian perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya yang meliputi empat tema, yaitu kemasyarakatan, ketenagakerjaan, produk dan konsumen, dan lingkungan hidup. Adanya kepedulian perusahaan terhadap masyarakat akan menimbulkan pengaruh yang positif pada perilaku pengelola perusahaan, sehingga pengelola perusahaan akan mengurangi tindakan manajemen laba. Dari sampel yang dipakai, sebagian besar telah menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya yang diukur dalam empat tema tersebut. Dari 3 (tiga) kali pengujian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa prinsip tanggung jawab mempunyai korelasi negatif yang cukup kuat dengan manajemen laba

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 3.10. Kesimpulan

Berdasarkan hasil-hasil yang diperoleh dari analisis pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hipotesis pertama ( $H_1$ ) menyatakan bahwa prinsip kewajaran berhubungan negatif dengan manajemen laba. Dari penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa pada tahun 2003 prinsip kewajaran berhubungan positif dengan manajemen laba walaupun tidak signifikan. Pada tahun 2004 berhubungan negatif dengan manajemen laba dan pada pengujian gabungan tahun 2003 dan 2004 juga berhubungan negatif dengan manajemen laba.
2. Hipotesis kedua ( $H_2$ ) menyatakan bahwa prinsip transparansi berhubungan negatif dengan manajemen laba. Dari penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa pada tahun 2003 prinsip transparansi berhubungan positif dengan manajemen laba walaupun tidak signifikan. Pada tahun 2004 berhubungan negatif dengan manajemen laba sedangkan pada pengujian gabungan tahun 2003 dan 2004 berhubungan positif dengan manajemen laba.
3. Hipotesis ketiga ( $H_3$ ) menyatakan bahwa prinsip akuntabilitas berhubungan negatif dengan manajemen laba. Dari penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa pada tahun 2003, 2004 dan pengujian gabungan tahun 2003 dan 2004, prinsip akuntabilitas berhubungan positif dengan manajemen laba walaupun tidak signifikan.
4. Hipotesis keempat ( $H_4$ ) menyatakan bahwa prinsip responsibilitas berhubungan negatif dengan manajemen laba. Dari penelitian yang telah dilakukan diperoleh

hasil bahwa pada tahun 2003, 2004 dan pengujian gabungan tahun 2003 dan 2004, prinsip responsibilitas berhubungan negatif dengan manajemen laba.

### **3.11. Implikasi Penelitian**

Meskipun perusahaan telah menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance*, namun ternyata hal tersebut tidak mempunyai hubungan negatif yang cukup kuat dengan praktik manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan. Oleh karena itu, investor sebaiknya tetap berhati-hati dalam menginterpretasikan laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan, karena penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* tidak menjamin tidak adanya praktik manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan. Disamping itu, investor juga harus memperhatikan informasi-informasi lain selain informasi keuangan yang disajikan oleh perusahaan.

### **3.12. Keterbatasan dan Saran**

Dari penelitian yang telah dilakukan dan hasil-hasil yang diperoleh, ada beberapa saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya yaitu :

1. Ukuran sampel diperbanyak karena ukuran sampel yang dipakai dalam penelitian ini cukup kecil, yang dikarenakan sampel yang diambil hanya dibatasi untuk perusahaan-perusahaan yang pernah mengikuti survei *Corporate Governance Perception Index* yang dilakukan oleh *The Indonesian Institute for Corporate Governance*.
2. Indikator yang dipakai untuk tiap variabel diperluas.



## DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad Syakhroza. 2000. "Bagaimana Mengukur Kinerja Terciptanya Good Corporate Governance". *Usahawan*. No. 10 th XXIX.
- Akhmad Syakhroza. 2003. "Best Practices Corporate Governance dalam Konteks Kondisi Lokal Perbankan Indonesia". *Usahawan*. No. 06 th XXXII.
- Azhar Maksum dan Azizul Kholis. 2003. "Analisis tentang Pentingnya Tanggung Jawab dan Akuntansi Sosial Perusahaan (Corporate Responsibility and Social Accounting) Studi Empiris di Kota Medan". *Simposium Nasional Akuntansi VI*. Surabaya.
- Beasley, Mark S. 1996. "An Empirical Analysis of the Relation Between the Board of Director Composition and Financial Statement Fraud". *The Accounting Review*. Vol. 71 No. 4. pp. 443-465.
- \_\_\_\_\_, J.V. Carcello, D.R. Hermanson dan P.D. Lapedes. 2000. "Fraudulent Financial Reporting: Consideration of Industry Traits and Corporate Governance Mechanisms". *Accounting Horizons*. Vol. 14 No. 4 December. pp. 441-454.
- Beattie, Vivie., Stephen Brown, David Erwers, Brian John Stuart Manson, Dylan Thomas dan Michael Turner. 1994. "Extraordinary Items and Income Smoothing: A Positive Accounting Approach". *Journal of Business Finance and Accounting*. Vol. 21. pp. 791-811.
- Bursa Efek Jakarta. *Sejarah BEJ*. <http://www.jsx.co.id>
- Chairuman Armia. 2002. "Peranan Budaya dalam Implementasi Good Corporate Governance". *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*. Vol. 4 No. 1. pp. 89-102.
- Chtourou, Sonda Marrakchi, Jean Bedard dan Lucie Courteau. 2001. "Corporate Governance and Earnings Management". *Working Paper*.  
<http://www.papers.ssrn.com>
- Dechow, P.M., R.G. Sloan dan A.P. Sweeney. 1995. "Detecting Earnings Management". *The Accounting Review*. Vol. 70 No. 2. pp. 193-225.
- DeFond, M.L. dan J. Jiambalvo. 1991. "Incidence and Circumstances of Accounting Errors". *The Accounting Review* 66. pp. 643-655.
- Deni Darmawati. 2003. "Corporate Governance dan Manajemen Laba: Suatu Studi Empiris". *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*. Vol. 5 No. 1 April. pp. 47-68.
- Diana Zuhroh dan I Putu Pande Heri Sukmawati. 2003. "Analisis Pengaruh Luas Pengungkapan Sosial dalam Laporan Tahunan Perusahaan terhadap Reaksi Investor". *Simposium Nasional Akuntansi VI*. Surabaya.

- Dye, R. 1988. "Earnings Management in An Overlapping Generations Model". *Journal of Accounting Research*. Autumn. pp. 195-235.
- Eddy R. Sembiring. 2003. "Kinerja Keuangan, *Political Visibility*, Ketergantungan pada Hutang, dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan". *Simposium Nasional Akuntansi VI*. Surabaya.
- Eva Martha Rahayu. 2005. "Terpercaya Dulu, Menuai Manfaat Kemudian". *Swasembada*. No. 09/XXI.
- Faizal. 2004. "Analisis Agency Costs, Struktur Kepemilikan dan Mekanisme Corporate Governance". *Simposium Nasional Akuntansi VII*. Denpasar.
- Fama, Eugene F. dan M.C. Jensen. 1983. "Separation of Ownership and Control". *Journal of Law and Economics*. Vol. XXVI. pp. 301-326.
- Harmanto Edy Jatmiko. 2001. "Saatnya Menjadi Perusahaan Terpercaya". *Swasembada*. No. 19/XVII.
- \_\_\_\_\_. 2004. "Ada Kemajuan Banyak Keprihatinan". *Swasembada*. No. 04/XX.
- Healy, P.M. dan James M. Wahlen. 1999. "A Review of the Earnings Management Literature and Its Implications for Standard Setting". *Accounting Horizons*. Vol. 13. No. 4. pp. 365-383.
- Hendriksen, Eldon S. dan Micahel F van Breda. 1992. *Accounting Theory*. Fifth Edition. Richard D. Irwin Corp: USA.
- Herwidayatmo. 2000. "Implementasi Good Corporate Governance untuk Perusahaan Publik di Indonesia". *Usahawan*. No. 10 th XXIX.
- Husein Umar. 2002. *Metode Riset Bisnis*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2001. *Standar Akuntansi Keuangan*. Salemba Empat. Jakarta.
- I Nyoman Tjager, F. Antonius Alijoyo, Humphrey R. Djemat dan Bambang Soembodo. 2003. *Corporate Governance: Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia*. PT Prenhallindo. Jakarta.
- I Putu Sugiarta. 2004. "Earnings Management and Information Content of Audit Committee Announcement". *Simposium Nasional Akuntansi VII*. Denpasar.
- Jensen, Michael C. dan William H. Meckling. 1976. "Theory of the Firm: Managerial, Behavior, Agency Costs and Ownership Structure". *Journal of Financial Economics*. Vol. 3 No. 4. pp. 305-360.
- Juli Setiono. 2000. "Good Governance". *Usahawan*. No. 10 th XXIX.

- Kresnohadi Ariyoto, dkk. 2000. "Good Corporate Governance dan Konsep Penegakannya di BUMN dan Lingkungan Usahanya". *Usahawan*. No. 10 th XXIX.
- La Porta, R., F.Lopez-de-Silanes dan A.Shleifer. 1999. "Corporate Ownership Around the World". *Journal of Finance*. Vol. 54. pp. 471-517.
- Lilis Setiawati dan Ainun Na'im. 2000. "Manajemen Laba". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*. Vol. 15 No. 4. pp. 424-441.
- Linda Kusumaning Wedari. 2004. "Analisis Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris dan Keberadaan Komite Audir terhadap Aktivitas Manajemen Laba". *Symposium Nasional Akuntansi VII*. Denpasar.
- Listyorini W.W. 2001. "Good Corporate Governance: Manfaat dan Permasalahannya". *Gema Stikubank*. Edisi 33 No. 2. pp. 33-43.
- McMullen, D dan K. Raghunandan. 1996. "Enhancing Audit Committee Effectiveness". *Journal of Accountancy*. August.
- Morris, Richard D. 1987. "Signaling, Agency Theory and Accounting Policy Choice". *Accounting and Business Research*. Vol. 18 No. 69.
- Mulyadi. 2002. *Auditing*. Buku 1. Salemba Empat. Jakarta.
- Nila Tristiarini. 2005. *Pengaruh Penerapan Corporate Governance terhadap Reaksi Return Saham pada Saat Pengumuman Laporan Keuangan 2003*. Tesis Program Studi Magister Sains Akuntansi Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang (tidak dipublikasikan).
- Nur Indriantoro dan Bambang Supomo. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. BPF. Yogyakarta.
- Parwoto Wignjohartojo. 2001. "Good Corporate Governance: Implementasi beserta Implikasi dan Masa depannya". *Majalah Ekonomi*. Tahun XI No. 1.
- Pratana Puspa Midiastuty dan Mas'ud Machfoedz. 2003. "Analisis Hubungan Mekanisme Corporate Governance dan Indikasi Manajemen Laba". *Symposium Nasional Akuntansi VI*. Surabaya.
- Puput Tri Komalasari. 2001. "Asimetri Informasi, Positive Accounting Theory dan Manajemen Laba". *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*. Vol. 2 No. 2. pp.92-111.
- Rachmat Saleh. 2004. "Studi Empiris Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Jakarta". *Symposium Nasional Akuntansi VII*. Denpasar.
- Ragjofal, S., M. Venkatachalam dan J. Jiambalvo. 1999. "Is Institutional Ownership Associated with Earnings Management and the Extent to Which Stock Price Reflect Future Earnings?" *Working Paper*. <http://www.papers.ssrn.com>

- Richardson, V.J. 1998. Information Asymmetry and Earnings Management: Some Evidence. *Working Paper*. <http://www.papers.ssrn.com>
- Rosenstein, S. dan J.G Wyatt. 1990. "Outside Directors, Board Independence, and Shareholder Wealth". *Journal of Financial Economics*. Vol. 26. pp175-191.
- Schipper, Katherine. 1989. "Commentary on Earnings Management". *Accounting Horizons*. Vol. 3 No. 4. pp. 91-102.
- Scott, William R. 1997. *Financial Accounting Theory*. Prentice-Hall International, Inc. New Jersey.
- Sekar Mayangsari. 2001. "Manajemen Laba dan Motivasi Manajemen". *Media Riset Akuntansi, Auditing dan Informasi*. Vol. 1 No. 2. pp. 49-70.
- \_\_\_\_\_. 2003. "Analisis Pengaruh Independensi, Kualitas Audit serta Mekanisme Corporate Governance terhadap Integritas Laporan Keuangan". *Simposium Nasional Akuntansi VI*. Surabaya.
- Shleifer, A. dan R.W. Vishny. 1997. "A Survey of Corporate Governance". *Journal of Finance*. Vol. 52. pp. 737-783.
- \_\_\_\_\_. 2004. *SPSS Versi 10 Mengolah Data Statistik Secara Profesional*. PT Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Singgih Santoso. 2004. *Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik*. PT Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Siti Munfiah Hidayati dan Zulaikha. 2003. "Analisis Perilaku Earning Management: Motivasi Minimalisasi Income Tax". *Simposium Nasional Akuntansi VI*. Surabaya.
- Slamet Sugiri. 1998. "Earnings Management: Teori, Model dan Bukti Empiris". *Telaah*. pp.1-15.
- Soegiharto. 2005. "Peran Akuntan dalam Menegakkan *Good Corporate Governance*". *Auditor*. Edisi 18.
- Sudarmadi. 2004. "Tak Rumit Menerapkan GCG". *Swasembada*. No.04/XX.
- Surifah. 2001. "Study tentang Indikasi Unsur Manajemen Laba pada Laporan Keuangan Perusahaan Publik di Indonesia". *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*. Vol. 5 No. 1. pp. 81-99
- Sutrisno. 2002. "Studi Manajemen Laba (Earnings Management): Eavaluasi Pandangan Profesi Akuntansi, Pembentukan dan Motivasinya". *Kompak*. No. 5. pp. 158-179.
- Sylvia Veronica N.P.S dan Yanivi S. Bachtiar. 2003. "Hubungan antara Manajemen Laba dengan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan". *Simposium Nasional Akuntansi VI*. Surabaya.

- Teguh S. Pambudi. 2001. "Barisan Perusahaan Terpercaya". *Swasembada*. No. 19/XVII.
- \_\_\_\_\_. 2004. "Barisan Perusahaan Terpercaya". *Swasembada*. No. 04/XX.
- Tri Gunarsih. 2003. "Struktur Kepemilikan sebagai Salah Satu Mekanisme Corporate Governance". *Kompak*. No. 8. pp. 155-172.
- Trueman, B dan S. Titman. 1988. "An Explanation for Accounting Income Smoothing". *Journal of Accounting Research*. Vol. 26. pp. 127-139.
- Warfield, T.D., J.J. Wild dan K. Wild. 1995. "Managerial Ownership, Accounting Choices and Informativeness of Earnings". *Journals of Accounting and Economics*. Vol. 20. pp. 61-91.
- Watts, Ross.L. dan Jerold.L. Zimmerman. 1986. *Positive Accounting Theory*. Prentice Hall Inc. New Jersey.
- \_\_\_\_\_. 1990. "Positive Accounting Theory: A Ten Years Perspective". *The Accounting Review*. Vol. 65 No. 1. pp. 131-156.
- Welker, M. 1995. "Disclosure Policy, Information Asymetry, and Liquidity in Equity Markets". *Contemporary Accounting Research* 11 (Spring). pp. 801-827.
- Wolk, Harry I. dan Michael G. Tearney. 1997. *Accounting Theory: A Conceptual and Institutional Approach*. 4<sup>th</sup> Edition. South Western College Publishing: Cincinnati.
- Yermack, D. 1996."Higher Market Valuation of Companies with a Small Board of Directors". *Journal of Financial Economics*. Vol. 40. pp. 185-211.
- Zaenal Arifin. 2003. "Pengaruh Corporate Governance terhadap Reaksi Harga dan Volume Perdagangan pada Saat Pengumuman Earnings". *Simposium Nasional Akuntansi VI*. Surabaya.

